

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)
KINERJA BAGIAN OLAH RAGA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG



TAPM Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

PINARTO

NIM : 014945333

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2009

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PPERNYATAAN

TAPM yang berjudul Kinerja Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Sintang, November 2009

Yang Menyatakan

PINARTO
NIP. 014945333

ABSTRAK**Kinerja Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang**

Pinarto
Universitas Terbuka
pinartomap@yahoo.com

Kata Kunci : Kinerja, Bagian Olahraga, Dinas Pendidikan

Tesis ini menitikberatkan pada kinerja bagian olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dengan tujuan mengetahui implementasi kebijakan, mengukur efektifitas, dan mengevaluasi kinerja bagian olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dalam pembinaan olahraga bagi pelajar di kabupaten sintang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, jenis penelitian adalah deskriptif, sedangkan subjek penelitian adalah pegawai bagian olahraga dinas pendidikan Kabupaten Sintang, pengawas olahraga dan beberapa guru olahraga sekolah yang terkait.

Anggaran, sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana menjadi kekuatan dan kelemahan dalam melaksanakan kegiatan/program/kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada Bagian Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Anggaran dan sumber daya manusia (SDM) memadai guna pelaksanaan masing-masing kegiatan yang telah direncanakan. Sarana prasarana dari fasilitas olahraga masih minim bila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah pelajar yang ada di Kabupaten Sintang.

Hasil penelitian menunjukkan kinerja bagian olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam pembinaan olahraga di Kabuapten Sintang, dilihat dari efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program kegiatan antara input output dan secara umum dapat dikatakan baik dan sudah memenuhi setandar pelayanan minimal.

A B S T R A C T**The Result of work sport section at Educational Department of Sintang**

Pinarto
Universitas Terbuka
pinartomap@yahoo.com

Key – Word : The Result of work, sport section, Educational

This thesis stresses to the sport division of education bureau in anatomy era. Its purpose to know the policy implementation, measuring the effectiveness and evaluating it in building sport for the students in Sintang regency.

The reaserch method uses qualitative method, kind is descriptive research, whereas the reaserch subject is the official and supervisor of sport section at education Bureau of Sintang regency and some sport teachers.

The budget, human resource, means and infrastructure are the important factor to do the activity program and policy, have been determined at the sport division of Sintang education Bureau. The sufficient budget and human resource is needed for doing activity that has been planned. But means of sport facilities still minimum if it is compared with the large of area and the number of students in Sintang regency.

The result of research shows the achievement sport division in running the duty and function for developing sport and Sintang. It we observe from effectiveness and efficiency of the crrying out of activitys programmes, both input and out put. Generally, it is good and can reach the minimum standard service.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : **Kinerja Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten
Sintang Dalam**

Penyusun TAPM : PINARTO

NIM : 014945333

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal :

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. DR. Arkanudin, M.Si
NIP. 131792348

DR. Suciati, M.Sc
NIP. 19520213 198503 2 001

Mengetahui

Ketua Bidang Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Program Magister Administrasi Publik

Direktur Program Pascasarjana

Dra. Susanti, M.Si
NIP. 19671214 199303 2 002

Prof. Dr. H. Udin S Winataputra, MA
NIP. 19451007 197302 1 007

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : PINARTO. S.IP
 NIM : 014945333
 Program Studi : Megister Administrasi Publik
 Judul TAPM : **Kinerja Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan
Kabupaten Sintang**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 31 Oktober 2009
 Waktu : 08.30 - 10.30 Wiba

Dan telah dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **3,49** (Tiga Koma Empat Puluh Sembilan)

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : Prof. Dr. Udin. S Winataputra, MA

Sekretaris Komisi : Joko Isdianto, S.Sos, M.Si

Penguji Ahli : Prof. Dr. HM Aries Djaenuri, MA

Pembimbing I : Prof. Dr. Arkanudin, M.Si

Pembimbing II : Suciati, Ph.D, M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tesis yang berjudul Kinerja Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dapat penulis selesaikan, guna memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik, Program Studi Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.

Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. DR. Arkanudin, M.Si, selaku dosen pembimbing I, yang telah banyak memberikan arahan dalam penyusunan tesis ini;
2. DR. Suciati selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan dalam penyusunan tesis ini;
3. Drs. H. Senen Maryono, M.Si, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang beserta staf yang telah mengijinkan dan memberikan pelayanan yang sangat memuaskan selama penulis melaksanakan penelitian;
4. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Terbuka kelas Sintang yang dalam menempuh pendidikan hingga penyelesaian tesis ini telah banyak membantu dan memberikan berbagai sumbangan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis;

5. Terima kasih kepada seluruh keluarga khususnya Istri tercinta dan anak-anak yang selalu mendoakan serta memberikan dorongan semangat;
6. Kepada pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuannya hingga terselesainya penulisan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan dan ketidaksempurnaan tesis ini oleh karena itu semua saran dan kritikan demi kesempurnaannya penulis terima dengan lapang dada. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menuju terciptanya *good governance* dan juga peneliti lain agar dapat dijadikan salah satu acuan guna penelitian lebih lanjut.

Sintang, November 2009

Penulis,

PINARTO
NIM. 014945333

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Pernyataan.....	ii
Abstrak.....	iii
Lembar Persetujuan.....	v
Lembar Pengesahan.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Bagan.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Teori.....	6
B. Kerangka Berpikir.....	48
C. Definisi Operasional.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Subjek Penelitian.....	52
C. Instrumen Penelitian.....	53
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	53
E. Metode Analisis Data.....	55
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	68
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	99
A. Simpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101

DAFTAR BAGAN

Bagan	Judul	Halaman
2.1.	Kerangka Berfikir Alur Penelitian	49

Puslata ~ Universitas Terbuka

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
4.1.	Struktur Organisasi Bagian Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.....	61
4.2.	Hasil wawancara dengan pertanyaan kekuatan dan kelemahan apa saja yang dimiliki dalam melaksanakan kegiatan program / kebijaksanaan.....	64
4.3.	Hasil wawancara dengan pertanyaan sumber daya manusia yang tersedia di bagian olahraga sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.....	65
4.4.	Hasil wawancara dengan pertanyaan bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana yang ada khususnya yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas.....	66
4.5.	Hasil wawancara dengan pertanyaan optimalisasi pemanfaatannya sarana dan prasarana yang ada khususnya yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas.....	67
4.6.	Hasil wawancara dengan pertanyaan peluang dan kendala/tantangan apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan/program/kebijaksanaan.....	76
4.7.	Hasil wawancara dengan pertanyaan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Olah Raga Nasional.....	88
4.8.	Hasil wawancara dengan pertanyaan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosialisasi undang-undang olahraga.....	89
4.9.	Hasil wawancara dengan pertanyaan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembentukan klub olahraga pelajar.....	90
4.10.	Hasil wawancara dengan pertanyaan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pekan olahraga pelajar antar sekolah.....	91

4.11.	Hasil wawancara dengan pertanyaan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pekan olahraga pelajar antar daerah (POPDA) Kalimantan Barat tahun 2008 yang dilaksanakan di Pontianak.....	92
4.12.	Hasil wawancara dengan pertanyaan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Kompetisi olahraga Tradisional	93
4.13.	Hasil wawancara dengan pertanyaan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan kegiatan POR Perbatasan banyak	93
4.14.	Hasil wawancara dengan pertanyaan apakah pelaksanaan kegiatan pada setiap tahunnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ...	96
4.15.	Hasil wawancara dengan pertanyaan apakah pelaksanaan kegiatan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat khususnya pelajar	97

Puslata ~ Universitas Terbuka

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
4.1.	Tabel Daftar Penilik Olahraga Kabupaten Sintang.....	61
4.2.	Data Guru Yang Berlatang Belakang Disiplin Ilmu Olahraga SD / SMP / SMA Per-Kecamatan Se-Kabupaten Sintang.....	62
4.3.	Data Sekolah Negeri/Swasta SD/MI, SMP/MTs, Dan MA/SMK/MA Per-Kecamatan Se-Kabupaten Sintang	63
4.4.	Capaian Indikator SPM Bidang Olahraga Bagian Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang	74
4.5.	Luas Wilayah Kabupaten Sintang.....	79
4.6.	Kebijakan dan Program Bagian Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2008.....	82
4.7.	Program Kerja dan Jenis Kegiatan Bagian Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2008.....	83
4.8.	Realisasi Anggaran Kegiatan Bagian Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2008.....	85
4.9.	Capaian Kinerja Sasaran Bagian Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2008.....	88
4.10.	Hasil dari Kegiatan Pembinaan Olahraga Bagian Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2008.....	89
4.11.	Data Atlet Berprestasi Tahun 2008	94

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	104
2.	Hasil Wawancara Responden.....	112
3.	Rekapitulasi Hasil Wawancara.....	115
3.	Biodata Peneliti	120
4.	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan	121
5.	Peta Kabupaten Sintang	122

Puslata ~ Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pada prinsipnya adalah mengatur penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang lebih mendekati pada fungsi pelayanan kepada masyarakat, kemandirian untuk mengembangkan daerah, sedangkan dari sisi keuangan diharapkan ada keadilan baru, yaitu yang kaya potensi sumber daya alam (SDA) akan mendapat banyak pendapatan. Titik berat penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan akan mampu terlaksana dengan baik, karena bagaimanapun bahwa daerah tentu lebih banyak mengerti mengenai kebutuhan daerahnya sendiri.

Dilaksanakannya otonomi daerah, akan membawa konsekuensi bagi daerah untuk melakukan penataan diberbagai bidang kegiatan sebagai akibat adanya perubahan termasuk masalah kelembagaan dan keuangan di daerah dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* (LAN dan BPKP, 2000:1). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat

dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan yang dibuat aturan menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen *good governance*.

Selama ini pengukuran keberhasilan ataupun kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar. Untuk dapat mengetahui keberhasilan suatu instansi dalam setiap aktivitas, maka harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak hanya semata-mata kepada *inputs* (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada *outputs* (keluaran), *outcomes* (hasil), *benefits* (manfaat) dan *impacts* (dampak).

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah dapat dilihat dari kemampuan instansi tersebut dalam mengelola sumber daya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Pada kenyataannya pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Bagian Olah Raga Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, belum dilaksanakan secara cermat dan menyeluruh. Hal ini disebabkan belum adanya suatu standar atau tolok ukur yang dipakai dalam pengukuran kinerja yang sekaligus dapat menginformasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Kesulitan lain adalah pengukuran tingkat kinerja suatu instansi pemerintah yang dilakukan sebelumnya adalah lebih menekankan pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran yang diberikan. Keberadaan Bagian Olah Raga Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya sesuai yang direncanakan dan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat di formulasikan sebagai berikut : “Bagaimana kinerja bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang”.

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang sistematis dengan menjunjung tinggi norma keilmiahan, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah perumusan tujuan penelitian. Perlunya tujuan penelitian dirumuskan agar penelitian yang dilakukan tidak keluar

dari bingkai permasalahan yang akan diteliti Tujuan penelitian harus ditentukan sebelum melakukan penelitian. Penentuan tujuan penelitian dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti.

Adapun tujuan penelitian tesis ini dilakukan adalah

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dalam pembinaan olah raga.
2. Mengukur efektifitas bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dalam pembinaan olah raga bagi pelajar yang ada di Kabupaten Sintang.
3. Mengevaluasi kinerja bagian olah raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang tahun anggaran 2008.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah apa yang akan diharapkan dari suatu penelitian atau hasil apa yang ingin dicapai setelah melakukan penelitian. kegunaan suatu penelitian mencakup dua hal penting. Dua hal penting tersebut yaitu kegunaan teoritis dan praktis. Kedua kegunaan tersebut merupakan realitas akademisi dan realitas sosial. Realitas akademisi dimaksudkan adalah kegunaan penelitian dapat dijadikan sebagai landasan teoritis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Realitas sosial yang dimaksud adalah kegunaan penelitian dapat dijadikan referensi dalam membangun masyarakat pluralistik kearah yang lebih bermartabat (Hariwijaya dan Triton P.B, 2005:50).

Berdasarkan pendapat di atas, maka kegunaan penelitian tesis ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian tesis ini dapat membuka sekat-sekat pemahaman yang bervariasi terhadap dinamika implementasi dan teknis pemerintahan yang permanen. Bagi perguruan tinggi mahasiswanya serta para peneliti yang akan datang dalam kasus atau objek penelitian yang sama, maka penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran segar dan aktual, dan dijadikan bahan masukan bagi bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dalam mengukur dan mengevaluasi kinerjanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar "kerja" yang menterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. dapat pula berarti hasil kerja. Pengertian Kinerja Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan - kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda - tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.

Kinerja menurut Mangkunegara (2000 : 67) "adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya". Kemudian menurut Sulistiyani (2003 : 223) "Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya". sedangkan Hasibuan (2001:34) mengemukakan "kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”.

Menurut Whitmore (1997 : 104) “Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang, kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum ketrampilan”. Cushway (2002 : 1998) “Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja dibandingkan dengan target yang telah ditentukan”.

Rivai (2004 : 309) mengemukakan kinerja adalah : “ merupakan perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan”. Robert L. Mathis dan John H. Jackson Terjemahan Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira (2001 : 78), “menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan”.

Pendapat yang berbeda dikemukakan John Witmore dalam *Coaching for Perfomance* (1997 : 104) “yang menyatakan bahwa kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan”. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negative dari suatu kebijakan operasional.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut memberikan pemahaman bahwa kinerja adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga dengan kemampuan tersebut dapat dicapai hasil kinerja yang maksimal. Mink (1993 : 76) menyatakan bahwa karakteristik individu atau seseorang yang memiliki kinerja tinggi antara lain : (a) berorientasi pada prestasi, (b) memiliki percaya diri, (c) berperendalian diri, (d) kompetensi.

Selanjutnya Mc. Clelland, mengemukakan 6 karakteristik dari seseorang yang memiliki motif yang tinggi yaitu : (a) Memiliki tanggung jawab yang tinggi, (b) Berani mengambil resiko, (c) Memiliki tujuan yang realistis, (d) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuan, (e) Memanfaatkan umpan balik yang kongkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukan, (f) Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah diprogramkan.

Faktor yang mempengaruhi kinerja, menurut Jackson (2001 : 82) adalah (a) Kemampuan mereka, (b) Motivasi, (c) Dukungan yang diterima, (d) Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, (e) Hubungan mereka dengan organisasi.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (*output*) individu maupun kelompok dalam suatu aktifitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi.

Menurut Mangkunegara (2000) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja (a) Faktor kemampuan Secara psikologis kemampuan (*ability*) pegawai terdiri

dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. (b) Faktor motivasi Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (*situasion*) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal. David C. Mc Clelland (1997) seperti dikutip Mangkunegara (2001 : 68), berpendapat bahwa “Ada hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan pencapaian kerja”. Motif berprestasi dengan pencapaian kerja. Motif berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) dengan predikat terpuji.

Menurut Gibson (1987) ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap kinerja (a) Faktor individu : kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang. (b) Faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja (c) Faktor organisasi : struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem penghargaan (*reward system*)

2. Konsep Kinerja Organisasi

Konsep kinerja (*Performance*) dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian hasil atau *degree of accomplishment* (Rue dan Byars, 1981 dalam Keban 1995). Hal

ini berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Mengingat bahwa alasan sebuah keberadaan dari suatu organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka informasi tentang kinerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting.

Informasi tentang kinerja organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai informasi tentang kinerja dalam organisasinya.

Untuk menilai kinerja organisasi ini tentu saja diperlukan indikator-indikator atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. Tanpa indikator dan kriteria yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif diantara : alternatif alokasi sumber daya yang berbeda; alternatif desain-desain organisasi yang berbeda; dan diantara pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda (Bryson, 2002). Sekarang permasalahannya adalah kriteria apa yang digunakan untuk menilai organisasi.

Sebagai sebuah pedoman, dalam menilai kinerja organisasi harus dikembalikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi. Misalnya, untuk sebuah organisasi privat/swasta yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dan barang

yang dihasilkan, maka ukuran kinerjanya adalah seberapa besar organisasi tersebut mampu memproduksi barang untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Indikator yang masih bertalian dengan sebelumnya adalah seberapa besar *efficiency* pemanfaatan input untuk meraih keuntungan itu dan seberapa besar *effectivity process* yang dilakukan untuk meraih keuntungan tersebut.

Sementara itu ada indikator yang sering kali digunakan untuk mengukur kinerja organisasi privat/publik seperti : *work load/demain, economy, efficiency, effectiveness dan equity* (Sclim dan Wood ward, 1992 dalam Keban, 1995) *productivity* (Perry, 1990 dalam Dwiyanto, 1995).

Dalam organisasi publik, sulit untuk ditemukan alat ukur kinerja yang sesuai (Fynn, 1986, Jackson dan Palmer, 1992 dalam Bryson, 2002). Bila dikaji dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan publik, kelihatannya sederhana sekali ukuran kinerja organisasi publik, namun tidaklah demikian kenyataannya, karena hingga kini belum ditemukan kesepakatan tentang ukuran kinerja organisasi publik.

Berkaitan dengan kesulitan yang terjadi dalam pengukuran kinerja organisasi publik ini dikemukakan oleh Dwiyanto (1995: 1), “kesulitan dalam pengukuran kinerja organisasi pelayanan publik sebagian muncul karena tujuan dan misi organisasi publik seringkali bukan hanya kabur akan tetapi juga bersifat multidimensional. Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh lebih banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholders dari organisasi publik

seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan satu dengan yang lainnya, akibatnya ukuran kinerja organisasi publik dimata para *stakeholders* juga menjadi berbeda-beda”.

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, pegawai bisa belajar seberapa besar kinerja mereka melalui sarana informasi seperti komentar baik dari mitra kerja. Namun demikian penilaian kinerja yang mengacu kepada suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan perilaku dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. Fokus penilaian kinerja adalah untuk mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif dimasa yang akan datang.

Begitu pentingnya masalah kinerja pegawai ini, sehingga inti pengelolaan sumber daya manusia adalah bagaimana mengelola kinerja SDM. Mengelola manusia dalam konteks organisasi berarti mengelola manusia agar dapat menghasilkan kinerja yang optimal bagi organisasi. Oleh karenanya kinerja pegawai ini perlu dikelola secara baik untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga menjadi suatu konsep manajemen kinerja (*performance management*).

Menurut definisinya, manajemen kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu yang menunjang keberhasilan organisasi melalui pengembangan performansi SDM. Dalam manajemen kinerja kemampuan SDM sebagai kontributor individu dan

bagian dari kelompok dikembangkan melalui proses bersama antara manajer dan individu yang lebih berdasarkan kesepakatan daripada instruksi. Kesepakatan ini meliputi tujuan (*objectives*), persyaratan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan, serta pengembangan kinerja dan perencanaan pengembangan pribadi. Manajemen kinerja bertujuan untuk dapat memperkuat budaya yang berorientasi pada kinerja melalui pengembangan keterampilan, kemampuan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh SDM. Sifatnya yang interaktif ini akan meningkatkan motivasi dan memberdayakan SDM dan membentuk suatu kerangka kerja dalam pengembangan kinerja. Manajemen kinerja juga dapat menggalang partisipasi aktif setiap anggota organisasi untuk mencapai sasaran organisasi melalui penjabaran sasaran individu maupun kelompok sekaligus mengembangkan potensinya agar dapat mencapai sasarannya itu. Berdasarkan tugasnya ini, manajemen kinerja dapat dijadikan landasan bagi promosi, mutasi dan evaluasi, sekaligus penentuan kompensasi dan penyusunan program pelatihan. Manajemen kinerja juga dapat dijadikan umpan balik untuk pengembangan karier dan pengembangan pribadi SDM. Keunggulan manajemen kinerja adalah penentuan sasaran yang jelas dan terarah. Di dalamnya terdapat dukungan, bimbingan, dan umpan balik agar tercipta peluang terbaik untuk meraih sasaran yang menyertai peningkatan komunikasi antara atasan dan bawahan. Hal ini karena pada dasarnya manajemen kinerja merupakan proses komunikasi berkelanjutan antara atasan dan bawahan dengan tujuan untuk memperjelas dan menyepakati hal-hal : (a) Fungsi pokok pekerjaan bawahan. (b)

Bagaimana pekerjaan bawahan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. (c) Pengertian “efektif” dan “berhasil” dalam pelaksanaan pekerjaan bawahan. (d) Bagaimana bawahan dapat bekerja sama dengan atasan dalam rangka efektivitas pelaksanaan pekerjaan bawahan. (e) Bagaimana mengukur efektivitas (baca : kinerja) pelaksanaan pekerjaan bawahan. (f) Berbagai hambatan efektivitas dan alternatif cara untuk menyingkirkan hambatan-hambatan tersebut.

Manajemen kinerja sangat bermanfaat bagi pihak atasan, bawahan dan organisasi. Bagi atasan, manajemen kinerja mempermudah penyelesaian pekerjaan bawahan sehingga atasan tidak perlu lagi repot mengarahkan dalam kegiatan sehari-hari karena bawahan sudah tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dicapai serta mengantisipasi kemungkinan hambatan yang muncul. Bagi bawahan, manajemen kinerja membuka kesempatan diskusi dan dialog dengan atasan berkaitan dengan kemajuan pekerjaannya. Adanya diskusi dan dialog memberikan umpan balik untuk memperbaiki kinerja sekaligus meningkatkan keahliannya dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu manajemen kinerja juga memberdayakan bawahan karena ia tidak perlu sedikit-sedikit “mohon petunjuk” kepada atasan karena telah diberikan arahan yang jelas sejak awal. Bagi organisasi, manajemen kinerja memungkinkan keterkaitan antara tujuan organisasi dan tujuan pekerjaan masing-masing bawahan. Selain itu, manajemen kinerja mampu untuk memberikan argumentasi yang relatif kuat untuk setiap keputusan yang menyangkut SDM.

Untuk dapat menerapkan manajemen kinerja dalam suatu organisasi, diperlukan adanya prasyarat dasar yang harus dipenuhi dalam suatu organisasi, yaitu :

(1) Adanya suatu indikator kinerja (*key performance indicator*) yang terukur secara kuantitatif dan jelas batas waktunya. Ukuran ini harus dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Jika perusahaan yang berorientasi pada profit, maka ukurannya adalah ukuran finansial seperti omset penjualan, laba bersih, pertumbuhan penjualan dan lain-lain. Sedangkan pada organisasi nirlaba seperti organisasi pemerintahan maka ukuran kinerjanya adalah berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Semua harus terukur secara kuantitatif dan dapat dimengerti oleh berbagai pihak yang terkait, sehingga bila nanti dievaluasi dapat diketahui apakah kinerja sudah dapat mencapai target atau belum. Michael Porter, Profesor dari *Harvard Business of School* menyatakan bahwa kita tidak bisa memajemeni sesuatu yang tidak dapat kita ukur. Organisasi yang tidak memiliki indikator kinerja biasanya tidak bisa diharapkan untuk mampu mencapai kinerja yang memuaskan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). (2) Semua ukuran kinerja tersebut biasanya dituangkan dalam suatu bentuk kesepakatan antara atasan dan bawahan yang sering disebut sebagai suatu kontrak kinerja (*performance contract*). Dengan adanya kontrak kinerja, maka atasan bisa menilai apakah si bawahan sudah mencapai kinerja yang diinginkan atau belum. Kontrak kinerja ini berisikan suatu kesepakatan antara atasan dan bawahan mengenai indikator kinerja yang ingin dicapai, baik mengenai sasaran pencapaiannya maupun jangka waktu

pencapaiannya. Ada dua hal yang perlu dicantumkan dalam kontrak kinerja yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai (*lag*) serta program kerja untuk mencapainya (*lead*). Keduanya perlu dicantumkan supaya pada saat evaluasi nanti berbagai pihak bersikap secara fair, dan tidak melihat hasil akhir semata, namun juga proses kerjanya. Bisa saja seorang bawahan belum mencapai semua hasil kerja yang ditargetkan, tetapi dia sudah melaksanakan semua program kerja yang sudah digariskan. Tentu saja atasan tetap harus memberikan reward untuk dedikasinya, walaupun sasaran akhir belum tercapai. Hal ini juga bisa menjadi dasar untuk perbaikan di masa mendatang (*continuous improvement*).

(3) Terdapat suatu proses siklus manajemen kinerja yang baku dan dipatuhi untuk dikerjakan bersama, yaitu: (a) Perencanaan kinerja, berupa penetapan indikator kinerja lengkap dengan berbagai strategi dan program kerja yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang diinginkan. (b) Pelaksanaan, di mana organisasi bergerak sesuai dengan rencana yang telah dibuat, jika ada perubahan akibat adanya perkembangan baru maka lakukan perubahan tersebut. (c) Evaluasi kinerja, yaitu menganalisis apakah realisasi kinerja sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Semuanya ini harus serba kuantitatif. (4) Adanya suatu sistem *reward and punishment* yang bersifat konstruktif dan konsisten dijalankan. Konsep *reward* ini tidak selalu harus bersifat finansial, tetapi bisa juga berupa bentuk lain seperti promosi, kesempatan pendidikan dan lain-lain. *Reward and punishment* diberikan setelah melihat hasil realisasi kinerja, apakah sesuai dengan indikator kinerja yang telah direncanakan atau belum. Tentu saja harus ada suatu *performance*

appraisal atau penilaian kinerja lebih dahulu sebelum *reward and punishment*. Penerapan *punishment* ini harus hati-hati, karena dalam banyak hal pembinaan jauh lebih bermanfaat. (5) Terdapat suatu mekanisme *performance appraisal* atau penilaian kinerja yang relatif obyektif yaitu dengan melibatkan berbagai pihak. Konsep yang sangat terkenal adalah penilaian 360 derajat, di mana penilaian kinerja dilakukan oleh atasan, bawahan, rekan sekerja, dan pengguna jasa, karena pada prinsipnya manusia itu berpikir secara subyektif, namun dengan berpikir bersama mampu untuk mengubah sikap subyektif itu menjadi mendekati obyektif, atau berpikir bersama jauh lebih obyektif daripada berpikir sendiri-sendiri. Ini adalah semangat dalam konsep penilaian 360 derajat. (6) Terdapat suatu gaya kepemimpinan (*leadership style*) yang mengarah kepada pembentukan organisasi berkinerja tinggi. Inti dari kepemimpinan seperti ini adalah adanya suatu proses *coaching, counseling, dan empowerment* kepada para bawahan atau sumber daya manusia di dalam manusia. Suatu aspek lain yang sangat penting dalam gaya kepemimpinan adalah sikap *followership* atau menjadi pengikut. Bagaimana jadinya bila semua orang menjadi komandan dalam organisasi? Bukan kinerja tinggi yang tercapai, namun kekacauan yang ada. Pada dasarnya seseorang itu harus memiliki jiwa kepemimpinan, tetapi dalam situasi yang lain dia juga harus memahami bahwa dia merupakan bagian dari sebuah sistem organisasi yang lebih besar yang harus diikuti. (7) Menerapkan konsep manajemen SDM berbasis kompetensi. Umumnya organisasi yang berkinerja tinggi memiliki kamus kompetensi dan menerapkan kompetensi itu

tersebut kepada hal-hal yang penting, seperti manajemen kinerja, rekrutmen, seleksi, pendidikan, pengembangan pegawai, dan promosi. Kompetensi ini meliputi kompetensi inti organisasi, kompetensi perilaku, dan kompetensi teknis yang spesifik dalam pekerjaan. Jika kompetensi ini sudah dibakukan dalam organisasi, maka kegiatan manajemen SDM akan menjadi lebih transparan, dan pimpinan organisasi juga dengan mudah mengetahui kompetensi apa saja yang perlu diperbaiki untuk membawa organisasi menjadi berkinerja tinggi.

Tahap-tahap dalam manajemen kinerja meliputi tahap penentuan objectives, penentuan sasaran yang berorientasi pada perilaku, menyiapkan dukungan yang diperlukan, evaluasi dan pengembangan serta memberi penghargaan. Proses manajemen kinerja melibatkan perencanaan, *coaching* dan *review*. Dalam perencanaan diidentifikasi dan ditentukan tingkat kinerja, apa sarannya serta bagaimana perilaku untuk mencapai sasaran, Dalam *coaching* dilakukan evaluasi, dukungan dan pengarahan secara berkesinambungan melalui diskusi dua arah. Dalam proses *review* dilakukan evaluasi terhadap pencapaian dan terhadap sasaran yang ditentukan dan hasilnya dijadikan sebagai umpanbalik.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu hal yang mendasar dalam manajemen kinerja. manfaatnya sebagai landasan untuk memberikan umpan balik, mengidentifikasi butir-butir kekuatan untuk mengembangkan kinerja di masa mendatang, serta mengidentifikasi butir-butir kelemahan sebagai sarana koreksi dan pengembangan. Langkah ini sebagai jawaban terhadap dua persoalan utama yaitu

apakah kita sudah mengerjakan hal yang benar dan apakah sudah mengerjakannya dengan baik.

Persoalan utama dalam pengukuran kinerja adalah kita telah mengukur hal yang strategis dan memberi nilai tambah terhadap strategi organisasi secara keseluruhan. Masalah lain yang perlu diwaspadai adalah terlalu berorientasi pada hasil dan mengabaikan proses, sistem remunerasi yang tidak mendukung kinerja, dan pengukuran yang tidak berdasarkan pada *team businessstructure*.

Evaluasi kinerja memiliki fokus yang berbeda tergantung kepada jenjang manajemennya. Bagi manajemen senior fokus evaluasi pada sasaran organisasi dan kemampuannya untuk meraih hasil yang utama. Untuk jenjang manajer madya memiliki fokus yang seimbang antara pencapaian sasaran perusahaan, kemampuan dan tugas-tugas baku. Bagi karyawan administrasi fokus evaluasi pada kemampuan mengerjakan tugas-tugas baku dan keluaran, sedangkan untuk jenjang operator terutama berfokus pada keluaran.

Dalam pelaksanaan manajemen kinerja terdapat lima komponen pokok, yaitu (a) Perencanaan kinerja, di mana atasan dan bawahan berupaya merumuskan, memahami dan menyepakati target kinerja bawahan dalam rangka mengoptimalkan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pada saat perencanaan kinerja ini atasan membantu bawahan dan menterjemahkan tujuan-tujuan organisasi ke dalam target kinerja individual dalam batasan anggaran yang tersedia. (b) Komunikasi berkelanjutan antara atasan dan bawahan guna memastikan bahwa apa

yang telah, sedang dan akan dilakukan bawahan mengarah pada target kinerjanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, hal ini juga berguna untuk mengantisipasi segala persoalan yang timbul. (c) Pengumpulan data dan informasi oleh masing-masing pihak sebagai bukti pendukung realisasi kinerja bawahan. Pengumpulan dapat dilakukan melalui formulir penilaian kinerja, observasi langsung maupun tanya jawab dengan pihak-pihak terkait. (d) Pertemuan tatap muka antara atasan dan bawahan selama periode berjalan. Pada saat inilah bukti-bukti otentik kinerja bawahan diklarifikasi, didiskusikan, dan disimpulkan bersama sebagai kinerja bawahan pada periode tersebut. (e) Diagnosis berbagai hambatan efektivitas kinerja bawahan dan tindak lanjut bimbingan yang dapat dilakukan atasan guna menyingkirkan hambatan-hambatan tersebut guna meningkatkan kinerja bawahan. Dengan adanya diagnosis dan bimbingan ini, bawahan tidak merasa “dipersalahkan” atas kegagalan mencapai target kinerja yang telah disepakati dan sekaligus menunjukkan niatan bahwa persoalan kinerja bawahan adalah persoalan atasan juga.

Begitu bermanfaat dan powerful-nya peranan manajemen kinerja, namun dalam pelaksanaannya seringkali terdapat persoalan, baik dari sisi atasan maupun sisi bawahan. Dari sisi atasan sebagai pejabat penilai ada keengganan menerapkannya karena faktor-faktor sebagai berikut :

Formulir dan tata cara penilaian seringkali sulit untuk dimengerti karena kriteria-kriteria yang digunakan tidak jelas pengertiannya atau memiliki pengertian

yang kabur, sehingga menimbulkan multi interpretasi, dan tata cara yang berbelit-belit.

Atasan tidak memiliki cukup waktu untuk menerapkan manajemen kinerja, karena persoalan pertama tadi,

Tidak ingin berkonfrontasi dengan bawahan, terutama mereka yang dinilai kinerjanya kurang baik. Sebab keengganan ini yaitu atasan tidak punya argumentasi yang kuat akibat tidak jelasnya kriteria penilaian yang digunakan. Selain itu atasan tidak ingin merusak hubungan baik dengan bawahan, misalnya karena satu nilai buruk, padahal hubungan baik sangat penting untuk bekerja sama dengan bawahan.

Atasan kurang mengetahui rincian pekerjaan sehingga tidak mengerti aspek-aspek apa yang harus diperhatikan ketika melakukan penilaian dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini berpengaruh pada kemampuan atasan memberikan umpan balik secara efektif guna perbaikan kinerja bawahan. Logikanya, bagaimana ia bisa memberikan masukan bila ia tidak mengerti betul liku-liku pekerjaan bawahan.

Keengganan dari sisi bawahan sebagai pihak yang dinilai adalah berikut ini :
Pengalaman buruk di masa lalu, di mana atasan memperlakukan kinerja bawahan yang kurang baik dengan sinis atau acuh sehingga bawahan tidak mendapatkan umpan balik yang bermanfaat bagi perbaikan kinerjanya.

Bawahan tidak suka dikritik, terutama bila dikaitkan dengan kinerjanya. Hal ini mungkin karena poin pertama, di mana atasan hanya bisa mengkritik tanpa memberikan jalan keluar yang jelas.

Ada rasa takut karena ketidakjelasan kriteria dan standar penilaian sehingga baik buruknya kinerja bawahan menjadi sangat subyektif (unsur suka atau tidak suka atasan terhadap bawahan amat dominan terhadap nilai kinerja bawahan), padahal hasil penilaian kinerja menentukan banyak hal penting bagi bawahan, di antaranya kenaikan pangkat, gaji dan perolehan bonus/insentif.

Bawahan tidak mengerti betul manfaat diterapkannya manajemen kinerja seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Hal ini karena kurang sosialisasi peran penting manajemen kinerja bagi keberhasilan organisasi.

Supaya berhasil dalam menerapkan manajemen kinerja ada kiat-kiat sebagai berikut :

(a) Sederhana, termasuk di dalamnya formulir penilaian yang isinya mudah dimengerti dan tata cara penilaian yang tidak berbelit-belit. Kesederhanaan ini penting untuk mencegah keengganan berbagai pihak yang akan menerapkannya. (b)

Seminimal mungkin menggunakan dokumen cetak karena di samping biaya, akan mengurangi kesan kesederhanaan manajemen kinerja. Bagaimana dapat dikatakan sederhana bila formulir untuk penilaian terdiri dari 10 lembar ukuran *doubel folio*? (c)

Seminimal mungkin menggunakan waktu kerja. Hal ini terkait dengan dua butir pertama karena manajemen kinerja yang sederhana dan tidak banyak menggunakan dokumen cetak biasanya tidak membutuhkan banyak waktu. (d) Senyaman mungkin

penerapannya bagi sebanyak mungkin pihak. Nyaman mungkin bersifat sangat relatif, namun ketiga butir di atas bisa dijadikan patokan kenyamanan, ditambah dengan pengkomunikasian apa saja manfaat manajemen kinerja dan menyiapkan pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi manajemen kinerja (melalui pelatihan atau sejenisnya) sehingga pada saatnya tidak ada kendala kompetensi baik dari sisi penilai maupun dari sisi yang dinilai. (e) Memenuhi keinginan atasan, bawahan dan organisasi, yaitu adanya perbaikan kinerja bawahan, unit kerja dan organisasi.

Namun ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik (Dwiyanto, 1995) yaitu sebagai berikut:

a. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output.

b. Kualitas Layanan

Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

d. Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit (Lenvine, 1990).

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat.

Beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan publik, antar lain adalah berikut ini:

a. Efisiensi

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis.

b. Efektivitas

Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut tercapai? Hal tersebut erat kaitannya organisasi rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.

c. Keadilan

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.

d. Daya Tanggap

Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini

Kinerja birokrasi sebenarnya dapat dilihat melalui berbagai dimensi seperti dimensi akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, responsivitas maupun tanggungjawab. Berbagai literatur yang membahas kinerja birokrasi pada dasarnya memiliki kesamaan substansial yakni untuk melihat seberapa jauh tingkat pencapaian hasil yang telah dilakukan oleh birokrasi pelayanan. Kinerja itu merupakan suatu konsep yang disusun dari berbagai indikator yang sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan konteks penggunaannya.

B. Konsep Peningkatan Kinerja Organisasi

Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi.

Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Atau dengan kata lain kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi, yaitu kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa disebut sebagai manajemen.

Sebagai produk dari kegiatan organisasi dan manajemen, kinerja organisasi selain dipengaruhi oleh faktor-faktor input juga sangat dipengaruhi oleh proses-proses administrasi dan manajemen yang berlangsung. Sebagai apapun input yang tersedia tidak akan menghasilkan suatu produk kinerja yang diharapkan secara memuaskan, apabila dalam proses administrasi dan manajemennya tidak bisa berjalan dengan baik. Antara input dan proses mempunyai keterkaitan yang erat dan sangat menentukan dalam menghasilkan suatu output kinerja yang sesuai harapan atau tidak.

Seperti sudah di ketahui bersama bahwa proses manajemen yang berlangsung tersebut, merupakan pelaksanaan dari fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, actuating, dan controlling* (POAC) atau lebih detailnya lagi adalah *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, regulating, dan budgetting* (POSDCORB).

Mengingat bahwa kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor input dan proses-proses manajemen dalam organisasi, maka upaya peningkatan kinerja organisasi juga terkait erat dengan peningkatan kualitas faktor input dan kualitas proses manajemen dalam organisasi tersebut.

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAN dan BPKP, 2000:51). Oleh sebab itu kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan selalu dikontrol dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

Sasaran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel yang dapat beroperasi secara efisien, efektif, responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya dalam rangka terwujudnya transparansi instansi pemerintah. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Inpres No.7/99).

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang ada pada suatu instansi pemerintah yang selanjutnya dievaluasi dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan/program/ kebijaksanaan yang telah ditetapkan (LAN dan BPKP, 2000:8). Dengan kata lain tujuan dari suatu kebijakan dan program harus dapat dijelaskan agar sistem akuntabilitas dapat bermanfaat bagi pembuat kebijaksanaan pada saat mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.

3. Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam Pedoman Penerapan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diterbitkan oleh LAN RI di Jakarta pada tahun 2000 dijelaskan (a) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban; (b) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi; (c) Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif bagi satuan/satuan organisasi, departemen, lembaga pemerintah non departemen dan instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun daerah; (d) Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. (e) Sistem AKIP adalah instrumen pertanggungjawaban yang meliputi berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu kiranya diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

4. Perencanaan Strategik

Perencanaan strategik dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah langkah awal untuk melaksanakan mandat. Di mana perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan

merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000:44).

Dengan kata lain perencanaan strategik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup (a) Uraian tentang visi, misi strategi, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi, (b) Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi, dan (c) Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Dengan memiliki visi, misi, dan strategi yang jelas maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi (LAN dan BPKP, 2000:44).

5. Program Pembinaan Olah Raga

Dalam kehidupan modern olah raga telah menjadi tuntutan dan kebutuhan hidup. Olah raga semakin diperlukan oleh manusia dalam kehidupan yang semakin kompleks dan serba otomatis, agar manusia dapat mempertahankan eksistensinya terhindar dari berbagai gangguan atau disfungsi sebagai akibat penyakit kekurangan gerak *Hypo Kinesis Disease*. Olah raga yang dilakukan dengan tepat dan benar akan menjadi faktor penting yang sangat mendukung untuk pengembangan potensi diri.

Sport berasal dari bahasa Latin "disportare" atau "deportare" dalam bahasa Itali "deporte" yang artinya menyenangkan, pemeliharaan atau menghibur untuk bergembira. Dapatlah dikatakan bahwa sport ialah kesibukan manusia untuk

mengebirakan diri sambil memelihara jasmaniah. Sedangkan antara sport dan bermain terdapat hubungan yang erat dan mempunyai sangkut paut yang bersifat struktural, bahwa sport adalah sebuah bentuk dari bermain yang lebih sempurna. Tetapi tidaklah dikatakan bahwa semua bentuk bermain adalah sport. Sport adalah sesuatu yang terkembang dari bermain, merupakan hasil perpaduan dari : Kebutuhan akan ketangkasan jasmani, Kebutuhan akan kesanggupan untuk mengatasi situasi, Kebutuhan akan mencapai nilai-nilai keindahan, Kebutuhan akan kegembiraan yang menyegarkan (rekreasi)

Olah raga merupakan gabungan dari segala latihan jasmani yang diadakan orang dengan sukarela untuk memperkuat dan mempersanggup tenaga tubuh, demikian juga selaras dengan itu memajukan pemusatan perhatian, kemauan.

Kesehatan, kebugaran jasmani dan sifat-sifat kepribadian yang unggul adalah faktor yang sangat menunjang Untuk pengembangan potensi diri manusia, dan melalui pendidikan jasmani, rekreasi, dan olah raga yang tepat faktor tersebut dapat diperoleh. Melalui pembinaan olah raga yang sistematis, kualitas SDM dapat diarahkan pada peningkatan pengendalian diri, tanggung jawab, disiplin, seportivitas yang tinggi yang mengandung nilai tranfer bagi bidang lainnya. Berdasarkan Sifat itu pada akhirnya diperoleh peningkalan prestasi olah raga yang dapat membangkitkan kebanggaan nasional dan ketahanan nasional secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pembagunan olah raga perlu mendapat perhatian yang lebih proporsional melalui perencanaan dan pelaksanaan yang sistematis dalam pembangunan nasional.

Hakekat pembangunan olah raga nasional adalah upaya dan kegiatan

pembinaan dan pengembangan olah raga yang merupakan bagian upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang utamanya ditujukan untuk pembentukan watak dan kepribadian termasuk sifat-sifat disiplin, sportivitas dan etos kerja yang tinggi. Berdasarkan kualitas kesehatan akan tercapai peningkatan prestasi olah raga yang dapat membangkitkan kebanggaan nasional dan membawa nama harum bangsa.

Penyelenggaraan pembangunan olah raga nasional utamanya didasarkan pada kesadaran serta tanggungjawab segenap warga negara akan hak dan kewajibannya dalam upaya untuk berpartisipasi guna peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui olah raga sebagai kebiasaan dan pola hidup, serta terbentuknya manusia dengan jasmani yang sehat, bugar, memiliki watak dan kepribadian, disiplin, sportivitas, dan dengan daya tahan yang tinggi akan dapat meningkatkan produktivitas, etos kerja dan prestasi.

Pembangunan olah raga selama ini dilaksanakan lewat dua jalur. Jalur pertama adalah melalui jalur pendidikan, yang penyelenggaraannya dikoordinasikan oleh Depdiknas, dan kedua adalah pembangunan olah raga lewat jalur masyarakat yang penyelenggaraannya selama ini di koordinasikan oleh Komite Olah raga Nasional Indonesia (KONI), sebagai organisasi yang mewakili unsur masyarakat. Pembangunan olah raga lewat jalur pendidikan atau sekolah dikenal dengan istilah pendidikan jasmani (*physical education*) ditempuh dengan cara memasukkan muatan pendidikan jasmani ke dalam satuan pelajaran pada setiap jalur dan jenjang pendidikan, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi baik intra maupun ekstrakurikuler. Sedangkan pelaksanaan pembangunan olah raga lewat jalur

masyarakat, ditempuh melalui serangkaian kegiatan yang serasi untuk tujuan peningkatan prestasi meliputi, pemassalan, pemanduan bakat, pembibitan calon atlet, pembinaan atlet, serta peningkatan prestasi atlet. Keseluruhan kegiatan itu membuktikan dukungan iptek keolah ragaan.

Sesuai dengan Undang-Undang No 25 tahun 2000, ada empat program pemerintah yang akan dilaksanakan dalam upaya pembangunan olah raga nasional yaitu: *Pertama*, Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan Olah raga; *Kedua*, Program Pemasyarakatan Olah raga dan Kesegaran Jasmani; *Ketiga*, Program Pemanduan Bakat dan Pembibitan Olah raga; *Kempat*, Program Peningkatan Prestasi Olah raga.

Pelaksanaan program-program pembangunan tersebut dilakukan secara merata, sistematis dan terpadu untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh tanah air dengan menyesuaikan kondisi geografis dan budaya bangsa, serta melibatkan seluruh potensi dan kekuatan bangsa, sehingga dapat diwujudkan suatu keluarga, masyarakat, dan bangsa yang memiliki kemampuan olah raga yang tangguh, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu kehidupan dan prestasi olah raga di tingkat nasional.

Model pembinaan bentuk segi tiga atau sering disebut pola piramid seharusnya berporos pada proses pembinaan yang bersinambung. Dikatakan bersinambung karena pola itu harus didasari cara pandang (paradigma) yang utuh dalam memaknai program pemassalan dan pembibitan dengan program pembinaan prestasinya. Artinya, program tersebut memandang penting arti pemassalan dan pembibitan yang bisa jadi berlangsung dalam program pendidikan jasmani yang baik,

diperkuat dengan program pengembangannya dalam kegiatan klub olah raga sekolah, dimatangkan dalam berbagai aktivitas kompetisi intramural dan idealnya tergodok dalam program kompetisi interskolastik, serta dimantapkan melalui pemuncakan prestasi dalam bentuk training camp bagi para bibit atlet yang sudah terbukti berbakat.

Dengan demikian, corak ini dapat dipastikan agak berbeda dari yang ditempuh dalam pembinaan olah raga di Indonesia umumnya, misalnya program PPLP, yang biasanya melupakan arti penting dari program penjas dan program olah raga rekreasi, tetapi langsung diorientasikan kepada puncak tertinggi dari model piramid. Yang ada bukan gambar pola piramid, tetapi lebih berupa gambar sebuah pencil (orang lebih suka menyebutnya sebagai *flag pole* model yang berarti model tiang bendera).

Secara tradisional, program pengajaran pendidikan jasmani digambarkan sebagai rantai dasar dari sebuah segitiga sama kaki, atau yang sering disebut sebagai bentuk piramid. Tepat di atasnya terdapat program olah raga rekreasi, atau lajim pula disebut program klub olah raga. Sedangkan di puncak segitiga terletak program olah raga prestasi.

Program pengajaran pendidikan jasmani adalah tempat untuk mengajarkan keterampilan, strategi, konsep-konsep, serta pengetahuan esensial yang berkaitan dengan hubungan antara kegiatan fisik dengan perkembangan fisik, otot dan syaraf, kognitif, sosial serta emosional anak. Ini berarti bahwa program pendidikan jasmani

yang baik bertindak sebagai dasar yang kokoh dan solid untuk seluruh program olah raga dan aktivitas fisik di sekolah dan masyarakat.

Pada tahap kedua, program olah raga yang bersifat rekreasi (dalam klub olah raga sekolah) merupakan upaya pengembangan dan perluasan program pendidikan jasmani yang sifatnya inklusif untuk semua anak. Pada program rekreasi inilah para siswa diperkenankan untuk memilih cabang olah raga yang diminatinya, serta disesuaikan dengan potensi atau bakat dirinya. Program ini di Indonesia lazim disebut program ekstra-kurikuler, yang seharusnya menyediakan kegiatan-kegiatan olah raga di luar struktur kurikulum dan program pendidikan jasmani.

Pada sekolah-sekolah di negara-negara yang menganut sistem olah raga melalui persekolahan, program olah raga ekstra-kurikuler ini dikelola oleh klub-klub olah raga yang dikembangkan di sekolah dengan sistem voluntir dan sekaligus bersifat wirausaha. Klub tersebut didirikan oleh organisasi sosial yang beragam, dari mulai perkumpulan orang tua, kepemudaan, klub olah raga murni, hingga para guru penjas sekolah yang bersangkutan, yang mengelola klubnya dengan format kewirausahaan bekerja sama dengan pihak sekolah.

Dengan format tersebut, para pengelola menggalang kerjasama dengan sekolah. Mereka mengajukan proposal kepada sekolah untuk menggunakan fasilitas sekolah, dengan perjanjian kerjasama bagi hasil atau sewa kontrak; sedangkan pihak pengelola menyediakan program, pelatih, serta mengelola dana yang dibayarkan

anak/siswa anggota klubnya. Dengan demikian, di sekolah tersebut bisa berdiri bermacam-macam klub olah raga, dari mulai olah raga individual seperti atletik, senam dan renang, olah raga beregu seperti cabang permainan (voli, basket, sepak bola, bola tangan), olah raga beladiri hingga olah raga petualangan atau pencinta alam.

Program yang ditawarkan oleh klub-klub tersebut bervariasi dari yang sifatnya rekreatif hingga ke tingkat persiapan untuk memasuki olah raga prestasi. Hal ini biasanya ditunjang oleh kurikulum pengembangan yang jelas, yang biasanya merupakan pengadopsian dari sistem pembinaan yang dikembangkan oleh setiap induk organisasi olah raga. Dengan demikian, pada program klub olah raga ini setiap pesertanya secara jelas terpetakan posisinya, apakah ia masuk tingkat pemula, tingkat lanjutan, atau tingkat mahir. Bahkan untuk olah raga tertentu, misalnya pada klub senam, tingkat-tingkat tersebut diperinci lagi misalnya dengan mengelompokkan petingkatan ini pada peringkat yang lebih detil: Pemula dibagi ke dalam tiga tingkat (tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3), Lanjutan dibagi ke dalam 3 tingkat (tingkat 4, tingkat 5, dan tingkat 6), kemudian Mahir juga dibagi ke dalam 3 tingkat, yaitu tingkat 7, tingkat 8, dan tingkat 9. Sedangkan di atas itu semua, tingkat 10 mewakili tingkat senior.

Dengan sistem semacam itu, yang mana setiap tingkat menunjukkan tingkat penguasaan keterampilan tertentu yang juga sudah ditentukan, akan cukup jelas kapan

siswa dapat meningkat atau memperbaiki tingkatnya ke tingkat berikut, serta persyaratan kompetensi apa yang harus dilewatinya melalui sebuah mekanisme ujian kenaikan tingkat atau melalui kejuaraan. Di samping itu, cukup jelas juga kewenangan pelatih dan penguji (wasit), yang untuk mampu menjalankan fungsinya pada tingkat tertentu pun harus pula memiliki kompetensi dan kewenangan pada peringkat tertentu, apakah ia pelatih atau wasit pemula, pelatih atau wasit lanjutan, atau termasuk pelatih atau wasit tingkat mahir (nasional) dan bahkan tingkat internasional.

Tidak kalah pentingnya dari sistem yang diberlakukan pada klub-klub sekolah di atas adalah (menciptakan) sistem kompetisi yang teratur dan tersistem. Kompetisi merupakan sebuah kewajiban bagi klub yang ada di sekolah, untuk minimal menyelenggarakan kompetisi antar kelas di lingkungan sekolah tersebut, atau lajim di sebut program intramural. Bahkan kalau mungkin klub yang bersangkutan mampu (menciptakan) menyelenggarakan program kompetisi ektramular (antar sekolah) melalui cara kerja sama dengan klub cabang olah raga sejenis yang ada di sekolah-sekolah lain untuk bertindak sebagai penyelenggara. Sifat kompetisi dirancang dalam format yang sangat sederhana, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi, tetapi mampu membangkitkan nilai kebanggaan pada para pesertanya, serta yang paling penting adalah dimanfaatkannya kompetisi itu sebagai ajang untuk membina nilai dan sifat-sifat luhur keolah ragaan bagi para peserta. Dengan demikian, siswa mampu menyelami dan menginternalisasi nilai-nilai sportivitas, *fair play*, kejujuran, semangat

pantang menyerah, menghargai keunggulan diri sendiri dan lawan, serta membina semangat kerja sama, korp, serta menjunjung sikap hormat pada orang lain.

Pada tataran terakhir, program olah raga prestasi sebenarnya merupakan kelanjutan dari dua program sebelumnya. Pada tataran ini, para guru penjas dan para pelatih memanfaatkan tersedianya data mengenai potensi dan bakat anak dari masing-masing sekolahnya untuk disalurkan pada program pemuncakan dalam bentuk training camp.

Training camp adalah suatu program yang dirancang atas inisiatif masyarakat olah raga, untuk menyediakan program yang selaras dengan misi peningkatan prestasi tanpa harus kehilangan dasar pengembangan dan menelantarkan landasan di tahap paling dasar; pendidikan jasmani. Program ini disediakan dalam bentuk *sport centers*, yang formatnya bisa bervariasi di antara kabupaten atau kota, sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan fasilitas serta sumber daya manusianya. Idealnya, training camp dalam format sport center ini dimiliki oleh setiap kota atau kabupaten, didasarkan pembagian wilayah. Maksudnya, jika sebuah kabupaten atau kota terdiri dari empat wilayah, maka minimal di satu wilayah terdapat satu sport centers, yang masing-masing sport centers tersebut mampu menyediakan beberapa program training camp untuk cabang olah raga yang dijadikan andalan kabupaten atau kota tersebut.

Setiap sport centers dikelola oleh para profesional di bidangnya masing-masing, dengan program dan kegiatan yang selalu direncanakan dan diperbaiki secara berkala, sehingga mampu menampung para siswa potensial dan berbakat dari setiap jenjang sekolah. Program training camp ini dapat diibaratkan sebagai sebuah *elite stream*, yang mendampingi dan melanjutkan program dari klub olah raga yang bisa juga disebut sebagai *recreational stream*.

Istilah *recreational stream* dan *elite stream* sudah lama dikenal dalam sistem pengembangan suatu cabang olah raga di negara maju. *Recreational stream* adalah sebuah program yang disediakan bagi seluruh siswa yang berminat memasuki suatu klub cabang olah raga tertentu, dengan tujuan memberikan pengenalan terhadap dasar-dasar keterampilan gerak olah raga sekaligus menanamkan rasa kesukaan dan kecintaan anak terhadap cabang olah raga yang diikutinya. Mengingat programnya ditujukan bagi mayoritas anak, maka program yang ditawarkan pun dirancang agar bisa sesuai dengan mayoritas anak; tidak terlalu sulit, dan memungkinkan anak bergerak maju sesuai dengan tingkat kemampuannya tanpa harus dipaksakan. Peningkatan peringkat anak ditentukan oleh tingkat penguasaannya terhadap paket yang sudah disediakan pada peringkat itu. Jika seorang anak dipandang sudah mampu menguasai 70 s/d 80 persen dari keterampilan yang disyaratkan, maka anak itu dapat meningkat ke peringkat selanjutnya.

Di pihak lain, *elite stream* adalah program yang dirancang khusus untuk anak-anak yang dianggap berbakat, terutama setelah diyakini berbakat melalui pengujian pemanduan bakat, baik secara antropometrik, biomotorik, serta psikologik dari cabang olah raga yang diikutinya. Program yang dirancang pada *elite stream* ini harus memungkinkan anak meningkat prestasinya secara meyakinkan, karena programnya sudah dirancang sedemikian rupa sesuai dengan prinsip-prinsip training, termasuk pula dalam hal intensitas, volume, durasi, serta frekuensinya. Dengan demikian, anak-anak yang akan dilibatkan dalam *elite stream* adalah anak-anak atau siswa yang sudah dipastikan mampu mengikuti secara ketat dan teratur program yang disediakan.

Jika proses pembinaan di Indonesia sudah mengikuti alur seperti yang diuraikan di atas, barulah kita bisa mengatakan bahwa pola pembinaan kita mengikuti pola piramid. Dan hanya dengan cara seperti itulah prestasi olah raga Indonesia dapat dibangkitkan kembali. Untuk itu, kualitas program pendidikan jasmani di sekolah perlu diperbaiki, program pendidikan

a) **Permasalahan dan Tantangan**

Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan olah raga dewasa ini, secara umum dapat dikelompokkan menjadi hal utama, dalam kaitannya dengan bidang pendidikan jasmani dan olah raga itu sendiri. Sejalan dengan kebijakan nasional yang akan ditempuh dibidang olah raga, maka permasalahan dan tantangan tersebut akan dirumuskan dalam kaitannya dengan empat (4) tema utama program pembangunan olah raga nasional yang tertuang di dalam propenas,

adalah sebagai berikut:

Pertama, permasalahan dalam kaitannya dengan pengembangan dan keserasian kebijakan olah raga. Masalah paling kritis dalam pembangunan olah raga nasional dewasa ini adalah ketidakmampuan seluruh institusi keolah ragaan untuk melaksanakan upaya pembinaan yang berlandaskan pada sebuah sistem manajemen yang mantap, yang ditandai dengan adanya interkoneksi dan keterpaduan segenap unsur terkait secara nasional. Selama ini, perumusan dan pelaksanaan kebijakan olah raga bersifat semi-independen yang dilaksanakan melalui Kementerian Pemuda dan Olah raga sebagai wakil pemerintah, dan Komite Olah raga Nasional Indonesia (KONI), beserta induk-induk olah raga yang ada, sebagai unsur masyarakat. Di sisi lain, kinerja dari kedua institusi tersebut terbukti memang belum mampu mewujudkan adanya keserasian dalam penerapan kebijakan di bidang keolah ragaan, yang pada akhirnya berujung pada lemahnya proses pembinaan dan tidak tercapainya target-target yang diharapkan dalam pembinaan keolah ragaan nasional. Sejalan dengan desentralisasi pembangunan, titik berat pelaksanaan pembangunan olah raga, tidak hanya bergeser dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi juga hares lebih mengarah pada pemberdayaan dan pembangkitan partisipasi masyarakat, sementara pemerintah lebih bergerak sebagai fasilitator dan motivator. Dengan semakin kompleksnya permasalahan-permasalahan nasional yang hares dihadapi di bidang keolah ragaan dewasa ini, tuntutan akan adanya pengembangan dan keserasian sistem manajemen kebijakan nasional dan keorganisasian, dalam arti luas, yang

menyangkut perencanaan, koordinasi, pendayagunaan sumber daya yang ada sampai pada evaluasinya, menjadi suatu hal yang mutlak harus dilaksanakan.

Kedua, permasalahan dalam kaitannya dengan masyarakatan olah raga dan kesegaran jasmani. Selama ini, masyarakat merupakan potensi utama dalam mendukung dan memacu peningkatan kemajuan olah raga nasional belum diberdayakan secara optimal. Dengan kondisi kesegaran jasmani masyarakat termasuk generasi muda hingga dewasa ini yang masih belum memadai seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu, perlu semakin didorong peransertanya dalam membangun kemandirian olah raga antara lain melalui perumusan kebijakan yang lebih mengarah pada upaya untuk memfasilitasi dan memotivasi masyarakat untuk lebih menghidupkan klub olah raga prestasi, memantapkan gerakan olah raga massal, olah raga pendidikan jasmani serta olah raga rekreasi. Upaya melestarikan olah raga tradisional, pengelolaan olah raga khusus dan olah raga rehabilitasi. Kegiatan itu diharapkan dapat terselenggara atas dasar semangat swakelola dan swadana. Sementara itu, aspek ekonomi olah raga membutuhkan perhatian sejalan dengan pengembangan industri olah raga. Sinyalemen tentang derajat kesegaran jasmani yang rendah pada semua lapisan masyarakat merupakan masalah serius, karena berkaitan dengan pemeliharaan ketahanan pribadi, rendahnya produktivitas, dan rendahnya derajat kesehatan dinamis yang dapat menjadi ancaman secara nasional.

Ketiga, permasalahan dalam kaitannya dengan pemanduan bakat dan pembibitan olah raga. Berdasarkan ukuran internasional, kinerja program pemanduan bakat dan pembibitan olah raga yang dilaksanakan di Indonesia masih

kurang sistematis yang berbuah pada ketidakmampuan atlet Indonesia dalam cabang olah raga tertentu untuk mampu bersaing di tingkat internasional. Oleh sebab itu, perlu diciptakan model dan perencanaan program pamanduan bakat dan pembibitan yang lebih sistematis dan terpadu, guna mendukung pembinaan yang berjenjang dan berkesinambungan, melalui penerapan metoda yang tepat dengan memanfaatkan iptek olah raga. Selanjutnya bibit-bibit olah ragawan berbakat yang berhasil diidentifikasi perlu dibina melalui pusat pembinaan seperti PPLP dan PPLM. Pada saat ini, secara keseluruhan, pembinaan olah raga masih bersifat sporadis dan kurang didasarkan pada orientasi jangka panjang, suatu kondisi yang bertentangan dengan kenyataan, bahwa pencapaian prestasi olah raga memerlukan waktu cukup panjang antara 10-12 tahun untuk dapat mencapai puncak usia prestasi, sesuai dengan watak olah raga masing-masing.

Keempat, permasalahan dalam kaitannya dengan prestasi olah raga. Permasalahan yang cukup serius dihadapi dalam masalah ini adalah lemahnya landasan pembinaan yang selama ini dilaksanakan lewat pendidikan jasmani, disertai dukungan partisipasi masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, pendidikan jasmani perlu dikembangkan secara intensif dan komprehensif dengan memperhatikan komponen kurikulum, guru, sarana dan prasarana. Sedangkan, proses pembinaan dengan model piramid yang berkesinambungan dari usia dini, junior, hingga atlet senior, juga kurang terwujud.

Dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan di atas, maka tantangan pembangunan olah raga untuk kurun waktu lima tahun kedepan adalah :

Pertama, dalam kaitannya dengan pengembangan dan keserasian kebijakan olah raga, adalah bagaimana mengupayakan langkah-langkah untuk terciptanya sistem koordinasi antar unit terkait baik di tingkat pusat sampai tingkat daerah sehingga dapat mewujudkan adanya keserasian dalam perumusan kebijakan olah raga.

Kedua, dalam kaitannya dengan pemasyarakatan olah raga dan kesegaran jasmani, adalah bagaimana mendorong partisipasi aktif masyarakat agar lebih peduli dengan kegiatan olah raga dan kemaslahatan yang diperoleh, seperti kondisi kesehatan paripurna, dan dampak pengiring lainnya seperti peningkatan produktivitas. Kegiatan kesegaran jasmani melalui penerangan/penyuluhan yang sistematis dengan lebih menggelorakan panji olah raga yaitu "*Memasyarakatkan olah raga dan mengolah ragakan masyarakat*". Selain itu, bagaimana meningkatkan dukungan masyarakat dalam pembinaan olah raga, terutama dalam kaitannya dengan penggalian sumber-sumber dana dari masyarakat secara legal dan transparan, sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana olah raga dapat dipenuhi.

Ketiga, dalam kaitannya dengan pemanduan bakat dan pembibitan olah raga adalah bagaimana menciptakan suatu sistem pemanduan bakat dan pembibitan olah raga baik lewat jalur sekolah maupun lewat jalur prestasi olah raga dengan didukung oleh tenaga-tenaga yang profesional dan penanganan yang terpadu.

Keempat, dalam kaitannya dengan prestasi olah raga adalah bagaimana meningkatkan daya saing Indonesia dalam *event-event* olah raga baik di tingkat regional dan internasional sehingga memberikan citra dan nama bangsa yang lebih baik di mata internasional.

b) Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan yang masih dihadapi dewasa ini, dan tantangan kedepan yang akan dihadapi dalam pembangunan olah raga, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui program-program pembangunan olah raga adalah sebagai berikut.

Pertama, untuk Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Olah raga, program ini bertujuan untuk mewujudkan keserasian kebijakan olah raga di berbagai bidang pembangunan. Sasaran kinerja program ini meliputi:

- a. terumuskannya dan terlaksananya kebijakan olah raga yang serasi bagi peningkatan kualitas dan kuantitas insan pelaku, praktis, dan pendukung olah raga; dan
- b. terumuskannya dan terlaksananya kebijakan olah raga yang serasi dan sinergi antara kebijakan di tingkat nasional dan kebijakan di tingkat daerah.

Kedua, untuk Program Pemasyarakatan Olah raga dan Kesegaran Jasmani, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani masyarakat dan pelaksanaan kegiatan olah raga termasuk olah raga masyarakat sehingga mendukung realisasi pola hidup sehat dan sejahtera keluarga dan masyarakat serta melestarikan olah raga tradisional sebagai salah satu unsur budaya nasional. Sasaran kinerja program ini adalah:

- a. meningkatnya derajat kesehatan dan kesegaran jasmani warga masyarakat, termasuk peserta didik, pekerja, dan kelompok lanjut usia untuk mendukung kapasitas belajar atau produktivitas kerja;

- b. meningkatnya jumlah dan kualitas olah raga yang berkembang di masyarakat termasuk untuk penyandang cacat, lanjut usia, dan olah raga tradisional; dan
- c. meningkatnya jumlah sarana dan prasarana olah raga, sebagai pendukung pendidikan jasmani, olah raga, dan rekreasi di lembaga pendidikan, tempat kerja, maupun yang langsung sebagai fasilitas umum bagi masyarakat.

Ketiga, untuk program Pemanduan Bakat dan Pembibitan Olah raga, program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olah raga sejak dini termasuk bagi penyandang cacat terutama di sekolah. Sasaran kinerja program ini adalah:

- a. meningkatnya jumlah dan kualitas wadah pembinaan olah ragawan pelajar/mahasiswa;
- b. model pemanduan bakat;
- c. meningkatnya jumlah dan kualitas kompetisi secara berjenjang berdasarkan prioritas cabang olah raga yang diunggulkan;
- d. meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana olah raga dengan kualitas yang memadai dan sesuai standar termasuk untuk penyandang cacat;
- e. meningkatnya peran organisasi olah raga termasuk olah raga penyandang cacat dalam upaya pemanduan bakat dan pembibitan olah raga;
- f. meningkatnya kualitas gizi sesuai standar bagi olah ragawan berbakat;
- g. meningkatnya kualitas kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olah raga; dan
- h. meningkatnya penerapan dan pemanfaatan iptek olah raga sebagai pendorong

peningkatan prestasi pada semua cabang olah raga.

Keempat, untuk Program Peningkatan Prestasi Olah raga, program ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi olah raga termasuk olah raga bagi penyandang cacat. Sasaran kinerja program ini adalah:

- a. meningkatkan prestasi olah ragawan di tingkat nasional yang antara lain ditandai dengan pemecahan rekor nasional;
- b. meningkatnya peringkat juara yang diraih atlet dalam kejuaraan olah raga termasuk olah raga bagi penyandang cacat tingkat internasional;
- c. termanfaatkannya iptek olah raga untuk meningkatkan prestasi olah raga;
- d. meningkatnya dukungan dunia usaha, industri, dan partisipasi masyarakat terutama dalam pendanaan dan pembinaan olah raga prestasi.

6. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Sebenarnya pengukuran kinerja mempunyai makna ganda yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, di mana kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategik dengan akuntabilitas sehingga suatu pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian misi organisasi instansi. Sebaliknya dengan disusunnya perencanaan

strategis yang jelas, perencanaan operasional yang terukur maka diharapkan tersedia pembenaran yang logis dan argumentasi yang memadai untuk mengatakan suatu pelaksanaan program berhasil atau tidak. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan yang pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam perencanaan strategik pemerintah daerah yang bersangkutan.

7. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas unit-unit kerja dalam satu lembaga pemerintahan sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.

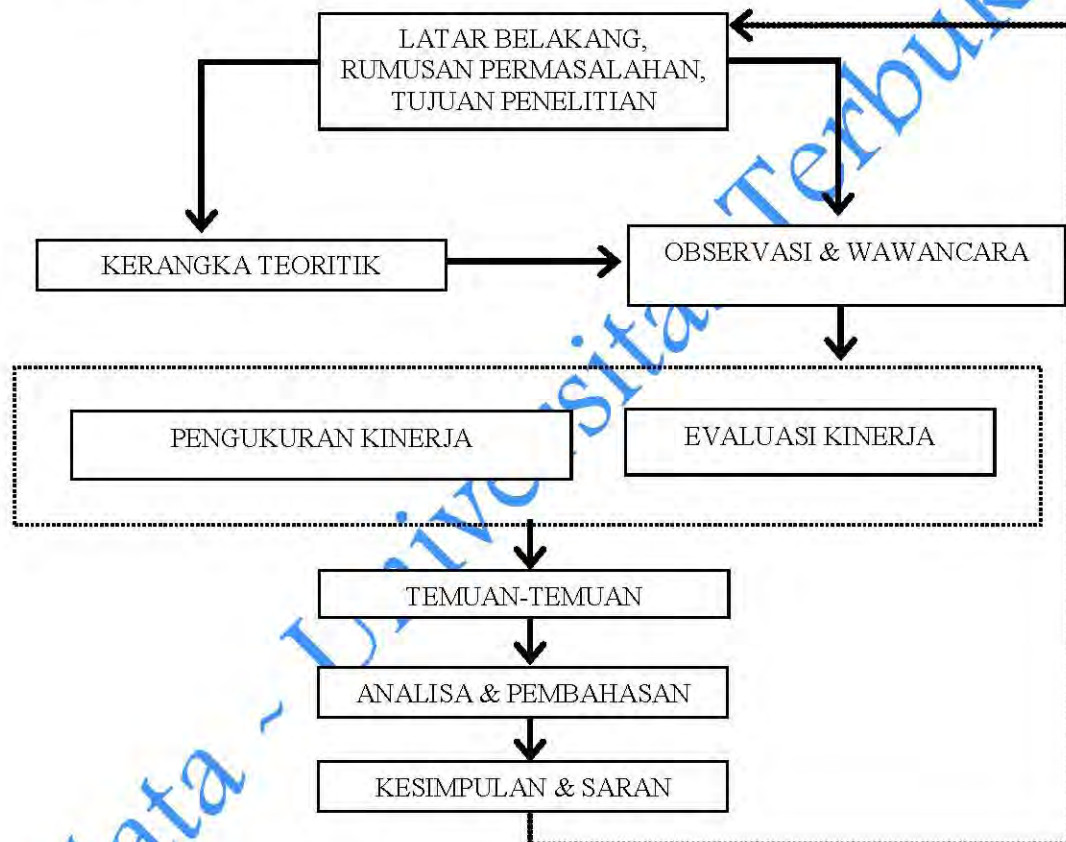
Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan lembaga pemerintah dan juga untuk mengetahui posisi perusahaan dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki, sehingga sasaran atau tujuan tercapai.

B. KERANGKA BERPIKIR

Kerangka berpikir adalah pola pikir yang diterapkan penulis untuk mendapatkan gambaran atau fokus perhatian sebuah dalam penelitian, Secara singkat hubungan antar komponen-komponen penelitian sebagai modal kerangka pikir

penelitian kinerja bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dapat divisualisasikan pada bagan 2.1.

Bagan 2.1. Kerangka Berfikir Alur Penelitian



C. DEFINISI OPERASIONAL

Penelitian menggunakan konsep definisi yang telah diformulasikan sesuai kepustakaan dan sesuai pula dengan pengamatan awal. Penggunaan konsep

dimasudkan agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman terhadap konsep-konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi oprasional tersebut adalah :

a. Kinerja adalah tingkat pencapain hasil (*degree of accomplishment*) atau dengan kata lain merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Indikator kinerja dapat diukur dengan mengacu beberapa konsep antara lain :

1) indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia;

2) indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau nonfisik;

3) indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung);

4) indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan;

5) indikator dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan (LAN dan BPKP, 2000:12).

b. Olah Raga

Olah raga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani. olah raga berfungsi untuk menyehatkan badan dan memastikan organ tubuh masih sehat.

Pembinaan olah raga yaitu mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pembinaan olah raga sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kondisi kesehatan fisik, mental rohani manusia Indonesia dalam upaya pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportifitas serta pencapaian prestasi yang tinggi.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu upaya mewariskan nilai, yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupan, dan sekaligus untuk memperbaiki nasib dan peradaban umat manusia.

d. Era Otonomi

Era otonomi adalah Perubahan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional serta pertimbangan keuangan Pusat dan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi dan peran serta masyarakat, implikasi kewenangan pembinaan ketenagaan dan kelembagaan antara lain kewenangan dalam penetapan kebijakan, menetapkan standar, dan norma, serta pembinaan dan pengawasan. pelaksanaan sepenuhnya ada pada daerah Kabupaten/Kodja.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif, menurut Bogdan dan Taylor, dalam Moleong (2003:3) mengidentifikasikan "Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati".

Berdasarkan pendapat tersebut maka jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif adalah penelitian yang berusaha untuk mencari data dalam bentuk :

- a. Tulisan-tulisan atau dokumen
- b. Lisan atau hasil wawancara langsung kepada informan
- c. Perilaku yang diamati atau kondisi objektif di lapangan

B. Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* dilakukan dengan mengambil orang yang memahami betul terhadap masalah yang diteliti dengan kriteria sebagai berikut :

1. Staf bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
2. Penilik olah raga
3. Guru olah raga

Sampel yang *purposive* adalah sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan rancangan penelitian dan diusahakan agar dapat mewakili populasi, tergantung pada penilaian atau pertimbangan (*judgment*) dari peneliti. Oleh karena itu *purposive sampling* disebut juga *judgemental sampling* (Soeratno dan Arsyad, 1999: 119-120).

Pada penelitian ini yang akan dilakukan wawancara mendalam terhadap kepala seksi pemuda dan olah raga, kepala bagian olah raga, pengelola keuangan dan staf. Jumlah sampel yang diambil adalah 25 orang dengan rincian 6 orang staf bagian olah Raga, 5 orang penilik olah raga dan 14 orang guru olah raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen dari penelitian ini adalah dengan memperhatikan program dan kegiatan/proyek Bagian Olah Raga Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dengan pengukuran kinerja meliputi :

1. Pengukuran kinerja
2. Evaluasi kinerja

D. Prosedur Pengumpulan Data

Data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif menurut Sudjana dan Awal

Kusumah (2000:85) ialah "data berupa nilai, seperti baik-sedang-kurang berdasarkan hasil penelitian tertentu".

Sedangkan teknik pengumpulan data menurut Dhuarie (2001:54) adalah teknik angket, wawancara, observasi, partisipatif dan test. Menurut pendapat diatas maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara mendalam

Adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada informan. Jawaban jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*). dokumentasi mengenai objek yang diteliti.

2. Observasi

Teknik ini peneliti lakukan untuk melengkapi dan memperkuat data wawancara sesuai apa yang dapat dilihat melalui visualisasi peneliti berdasarkan rumusan permasalahan penelitian.

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman wawancara.

Dalam pedoman wawancara, peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada informan untuk memberikan jawaban atau komentar seluasluasnya terhadap permasalahan yang diteliti. Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi, data atau keterangan sesuai apa yang diinginkan oleh seseorang yang memerlukan informasi tersebut. Menurut

Suharsini (1993), "Informan adalah orang-orang yang ditentukan atau dipilih untuk memberikan jawaban ketika berlangsungnya wawancara, sehingga dapat diperoleh informasi yang berkenaan dengan masalah penelitian".

2. Pedoman observasi

Dalam melakukan observasi peneliti sudah menyiapkan pedoman observasi, selanjutnya dapat mengisi berbagai data yang berhubungan dengan masalah - penelitian dengan menggunakan *chek list*.

3. *Tape recorder* digunakan untuk merekam pembicaraan pada saat proses

wawancara antar peneliti dan informan berlangsung.

4. Kamera digunakan untuk mengumpulkan data-data fisik yang tidak ada

dokumentasinya.

5. Buku catatan digunakan untuk mencatat jawaban jawaban penting dari informan

terhadap permasalahan penelitian.

E. Metode Analisis Data

Analisis suatu data adalah suatu cara menyederhanakan data yang sudah didapat agar mudah dipahami dan mudah ditafsirkan oleh pembaca untuk buat suatu kesimpulan, menurut Singarimbun dan Effendi (dalam Rahim, 2002:20) bahwa analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan di interpretasikan.

Beberapa teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik

kualitatif yaitu teknik analisis data tanpa menggunakan rumus-rumus statistik. teknik yang dipergunakan dalam analisis data kualitatif ada tiga langkah yaitu reduksi data, display data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan pendapat di atas maka langkah-langkah analisis data dalam tulisan ini sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian kemudian dipilih hal-hal yang pokok yang mengarah kepada fokus penelitian. Tujuan mengadakan reduksi data adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian serta dapat memberikan data terhadap fokus yang diteliti.

b. *Display* Data

Display data dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menginformasikan suatu data secara terorganisir yang memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan, pengambilan tindakan dan merupakan bagian data yang ada dalam analisis.

c. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data. Pemeriksaan data dapat dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan, kejadian kasus negatif dan pengecekan anggota (Moleong, 1996:167). Dalam hal ini langkah-langkah pengecekan atau pemeriksaan data yaitu dengan memperpanjang masa observasi, pengamatan yang terus menerus, triangulasi, membicarakan dengan

orang lain, menganalisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan membercek.

d. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya verifikasi dan penarikan kesimpulan didefinisikan sebagai pengertian arti dari data yang dikumpulkan dengan melibatkan pemahaman penelitian. Sejak semula melakukan penelitian diusahakan untuk mencari makna data yang dikumpulkan, untuk itu perlu dicarinya pola, tema, hipotesis dan sebagainya sehingga peneliti mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh dilokasi penelitian.

Sesuai dengan langkah-langkah diatas maka peneliti melakukan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengklasifikasikan data dalam bentuk tabel sesuai aspek-aspek penelitian. Data yang telah diklasifikasikan dalam bentuk tabel tersebut disajikan dan dianalisis berdasarkan aspek-aspek yang diteliti data yang sudah dianalisis kemudian disimpulkan dengan diajukan saran-saran atau rekomendasi dalam laporan penelitian.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 372 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan. Berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tersebut, Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang merupakan salah satu bagian yang membantu pelaksanaan program kerja Dinas Pendidikan khususnya olah raga yang bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.

A. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 372 Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten. Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah mengenai susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan. bahwa Bagian olah olah raga mempunyai tugas pokok “penyelenggaraan dan pembinaan kegiatan olah raga”, untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bagian olah raga Dinas Pendidikan kabuapten sintang mempunyai fungsi:

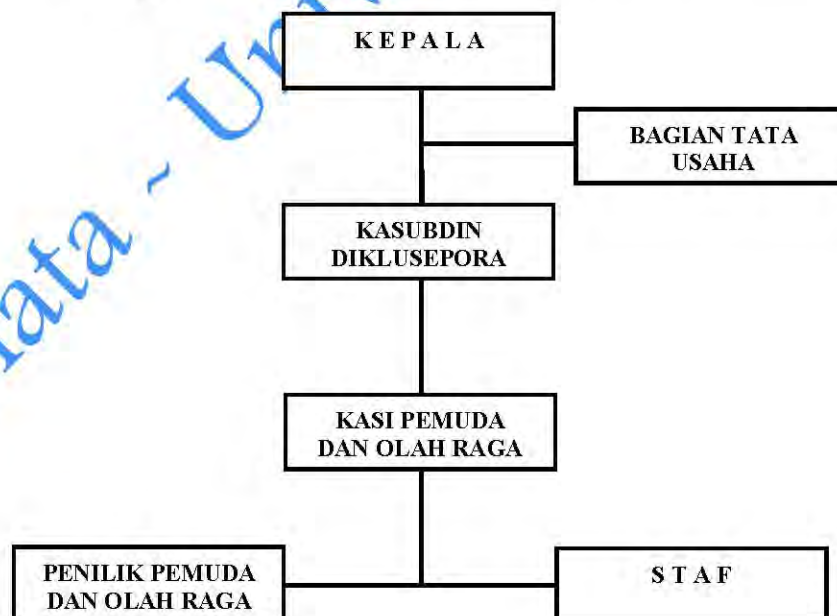
1. Menyusun program pembinaan pemuda dan olah raga
2. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan olah raga di sekolah dan diluar sekolah
3. Melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas olah raga.
4. Melaksanakan pembinaan perkumpulan pemuda dan oleh raga.
5. Melaksanakan penyelenggaraan pekan olah raga.
6. Memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat/tradisional
7. Melaksanakan pelaksanaan kompetisi olah raga antar sekolah.
8. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga penilik olah raga dan generasi muda pelatih, atlet, organisasi pemuda dan klub olah raga.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas diperlukan perangkat organisasi berupa struktur organisasi bagian olah raga yang menggambarkan bagaimana organisasi itu mengatur dirinya sendiri, bagaimana

mengatur hubungan antar orang dan antar kelompok untuk bisa mencapai tujuan yang ingin dicapainya merupakan keputusan yang diambil oleh organisasi itu sendiri berdasarkan situasi, kondisi dan kebutuhan organisasi.

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Bagian Olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2007

B. Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana

Sumber daya manusia (kadang disingkat SDM) adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 11 personil terdiri dari 8 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 3 orang tenaga honorer dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala bagian olah raga = 1 orang
2. Penilik olah raga = 5 orang
3. Staf bagian olah raga = 5 orang

Tabel 4.1. Tabel Daftar Penilik Olah raga Kabupaten Sintang

No	Kecamatan	Nama	Jumlah
1	Sintang	A.Koran	1 Orang
2	Sepauk	Jonatan.Z.Nabu Nome	1 Orang
3	Kayan Hilir	Alexsius	1 Orang
4	Serawai	Elias Pujung	1 Orang
5	Ketungau Tengah	Stevanus	1 Orang
6	Ketungau Hulu	-	-
7	Ketungau Hilir	-	-
8	Ambalau	-	-
9	Binjai Hulu	-	-
10	Dedai	-	-
11	Kelam Permai	-	-
12	Tempunak	-	-
13	Sungai Tebelian	-	-
14	Kayan Hulu	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2008

Tabel 4.2. Data Guru Yang Berlatang Belakang Disiplin Ilmu Olah raga SD/SMP/SMA Per-Kecamatan Se-Kabupaten Sintang

No	Kecamatan	Jumlah Guru Olah raga			Ket
		SD	SMP	SMA	
1	Ambalau		-	1	- Kurangnya guru OR yang berlatar belakang khusus disiplin ilmu olah raga
2	Serawai	3	1	1	
3	Kayan Hulu	3	-	1	
4	Kayan Hilir	5	2	-	
5	Ketungau Hulu	1	2	-	
6	Ketungau Tengah	1	2	1	- Kekurangan diatasi dengan guru bidang studi lain
7	Ketungau Hilir	6	1	1	
8	Binjai Hulu		-	1	
9	Sepauk	7	11	1	
10	Tempunak	4	6	1	
11	Sungai Tebelian	10	5	1	
12	Dedai	9	5	1	
13	Kelam Permai	1	3	2	
14	Sintang	20	15	23	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2008

Secara bahasa prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pembinaan olah raga, misalnya : lokasi/tempat, bangunan, lapangan olah raga, Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pembinaan misalnya ; Ruang, Buku, peralatan kantor, dengan demikian bahwa sarana dan prasarana itu adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pelaksanaan tugas pokok untuk mencapai tujuan dalam pembinaan olah raga itu sendiri.

Tabel 4.3. Data Sekolah Negeri/Swasta SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/SMK/MA Per-Kecamatan Se-Kabupaten Sintang

NO	Kecamatan	Jumlah Sekolah dan Siswa						KET
		SD	Siswa	SMP	Siswa	SMA	Siswa	
1	Ambalau	30	3396	3	583	1	93	
2	Serawai	25	4081	5	998	1	384	
3	Kayan Hulu	28	3707	4	516	1	105	
4	Kayan Hilir	29	3960	3	646	1	231	
5	Ketungau Hulu	26	3851	5	712	1	249	
6	Ketungau Tengah	32	5040	5	883	2	409	
7	Ketungau Hilir	34	3978	3	421	1	58	
8	Binjai Hulu	9	1493	2	342	1	56	
9	Sepauk	43	6312	8	1296	2	422	
10	Tempunak	26	3912	6	879	1	16	
11	Sungai Tebelian	24	4029	6	1159	1	308	
12	Dedai	28	3933	5	1022	1	34	
13	Kelam Permai	15	2221	5	734	1	3223	
14	Sintang	33	7353	14	3869	12	3855	
Jumlah		382	57266	74	14060	27	9443	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2008

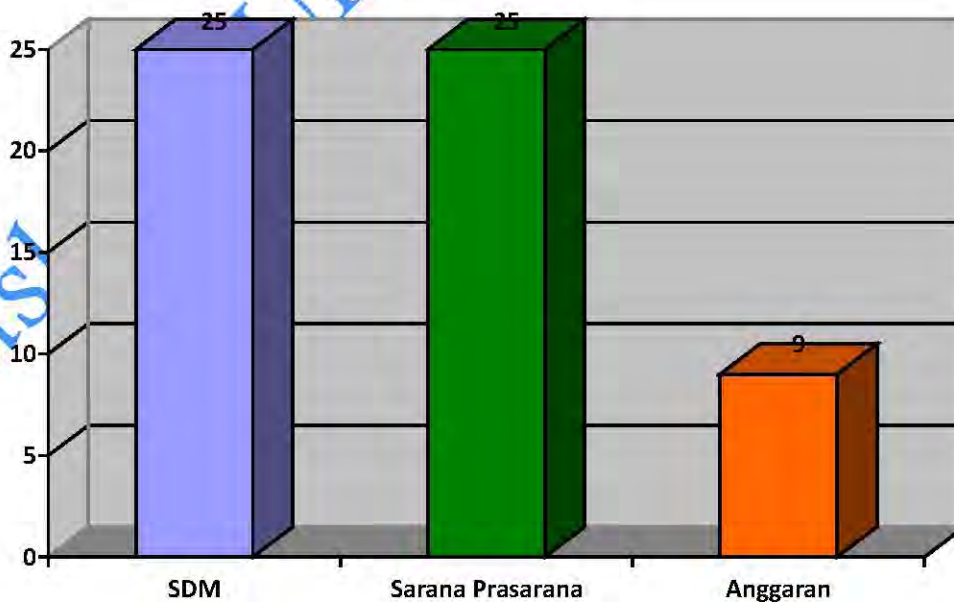
Sedangkan dalam melaksanakan tugas bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang di dukung tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sarana dan prasarana yang tersedia di bagian olah raga, kondisi gedung berbentuk permanen dan cukup kokoh dan representatif untuk ukuran sebuah bagian organisasi tata pemerintahan, keadaan gedung masih baru dan terawat baik dan terdapat beberapa fasilitas penunjang pelaksanaan tugas bagian olah raga antara lain :

1. Ruang kepala bagian olah raga = 1 unit
2. Ruang staf = 1 unit
3. Peralatan kantor

- a. Meja = 8 buah
- b. Kursi = 20 buah
- c. Lemari arsip = 2 buah
- d. Komputer = 2 unit
- e. Mesin tik = 1 unit

Dari hasil wawancara dengan 25 responden untuk pertanyaan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang kekuatan dan kelemahan apa saja yang dimiliki dalam melaksanakan kegiatan/program/kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, hasilnya sebagai berikut.

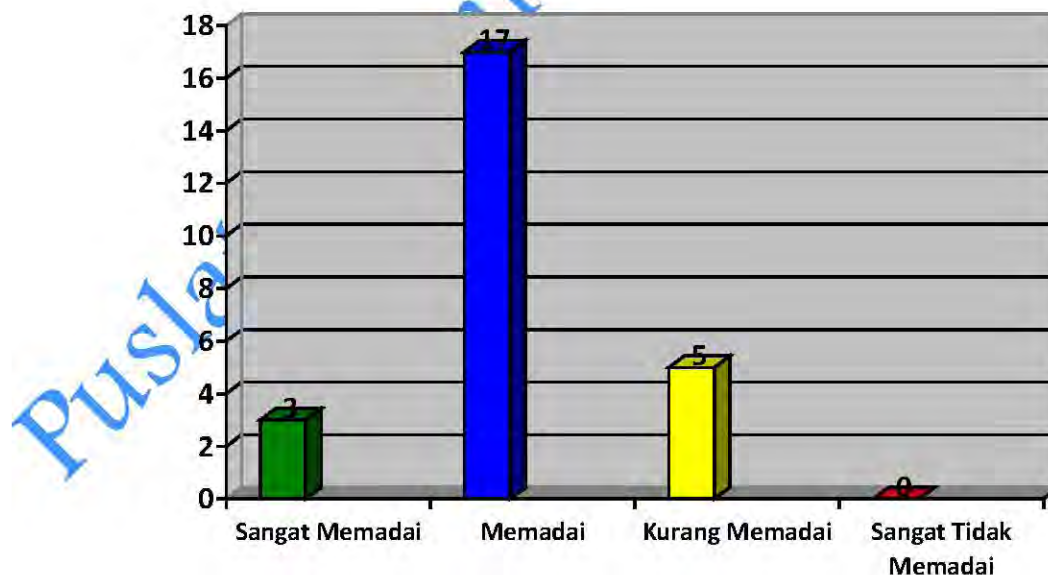
Gambar 4.2. Hasil wawancara dengan pertanyaan kekuatan dan kelemahan apa saja yang dimiliki dalam melaksanakan kegiatan/program/kebijaksanaan



Dari semua responden 25 orang menjawab sumber daya manusia (SDM), dan ketersediaan sarana dan prasarana bagian olah raga yang menjadi kekuatan serta kelemahan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Olah Raga, 10 orang menyertakan jumlah anggaran yang ada mempengaruhi bagian olah raga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Hasil wawancara untuk pertanyaan apakah sumber daya manusia yang tersedia di bagian olah raga sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, adalah sebagai berikut.

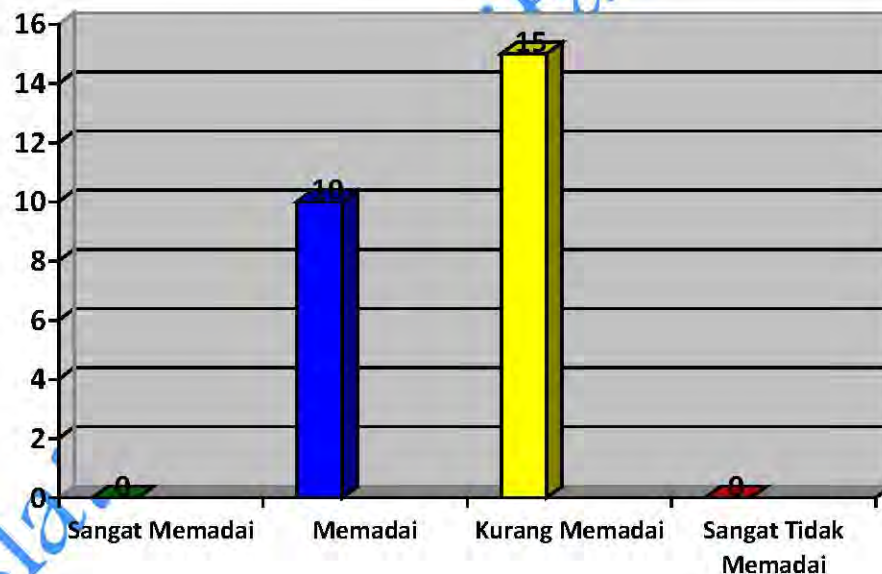
Gambar 4.3. Hasil wawancara dengan pertanyaan sumber daya manusia yang tersedia di bagian olah raga sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi



Dari 25 responden 3 orang menjawab sangat memadai, 17 orang menjawab memadai, dan 5 orang menjawab kurang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.

Hasil wawancara untuk pertanyaan menurut bapak/ibu, bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana yang ada khususnya yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas, adalah sebagai berikut.

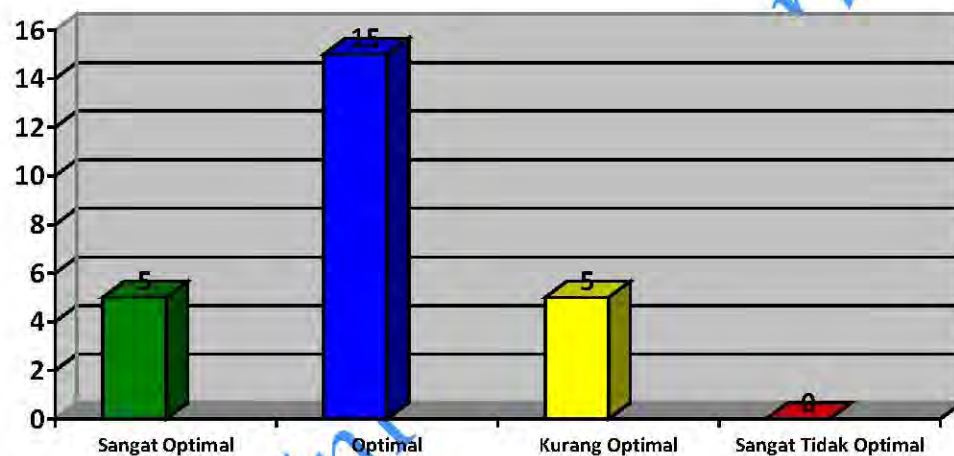
Gambar 4.4. Hasil wawancara dengan pertanyaan bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana yang ada khususnya yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas



Dari 25 orang responden 10 orang memberikan jawaban memadai, 15 orang menjawab kurang memadai, hal ini dikarenakan alat-alat olah raga dan fasilitas olah raga di sekolah-sekolah kurang memadai guna penyaluran minat dan bakat siswa pelajar yang ada di Kabupaten Sintang khususnya pada daerah yang terpencil.

Hasil wawancara untuk pertanyaan seberapa besar optimalisasi pemanfaatannya sarana dan prasarana yang ada khususnya yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas, adalah sebagai berikut.

Gambar 4.5. Hasil wawancara dengan pertanyaan optimalisasi pemanfaatannya sarana dan prasarana yang ada khususnya yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas



Dari 25 orang responden, 5 orang menjawab sangat optimal 15 orang menjawab optimal dan 5 orang menjawab kurang optimal, dalam pemanfaatannya walaupun kelengkapannya sarana dan prasarana masih kurang memadai.

C. Kebijakan Pembinaan Olah raga dalam Kaitan Otonomi Daerah

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat pada perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan secara Nasional.

Perubahan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut adalah penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional serta pertimbangan keuangan Pusat dan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi dan peran serta masyarakat. Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tersebut maka implikasi kewenangan pembinaan ketenagaan dan kelembagaan UPT antara lain kewenangan dalam penetapan kebijakan, menetapkan standar, dan norma, serta pembinaan dan pengawasan. pelaksanaan sepenuhnya ada pada daerah Kabupaten/Kodja.

Program pembinaan olah raga yaitu mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pembinaan olah raga sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kondisi kesehatan fisik, mental rohani manusia Indonesia dalam upaya pembentukan watak dan kepribadian, disiplin dan sportifitas serta pencapaian prestasi yang tinggi.

- 1) Sasaran pembinaan olah raga diarahkan pada
 - a) Peningkatan pemerataan pembinaan olah raga di jenjang pendidikan

- b) Peningkatan relevansi pembinaan olah raga sebagai bagian dari pada pembinaan pendidikan
- c) Peningkatan mutu olah raga sebagai alat memacu tercapainya prestasi olah raga pelajar
- d) Peningkatan efisiensi dan efektivitas olah raga untuk lebih mengembangkan potensi olah raga prestasi yang telah bersekala nasional.

2) Pemasyarakatan Olah raga

Untuk lebih mendorong tercapainya kegiatan olah raga yang lebih memasyarakat maka pembinaan olah raga diupayakan pada:

- a) Peningkatan perluasan dan pemerataan, melalui kegiatan-kegiatan
 - Pemassalan olah raga pelajar
 - Pemassalan olah raga mahasiswa
 - Pemassalan olah raga masyarakat
- b) Untuk cabang-cabang olah raga potensial yang dimulai sejak usia dini akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan
 - Pembibitan olah raga pelajar dan mahasiswa
 - Pembinaan secara khusus ditangani melalui kelas olah raga pelajar di sekolah, dan Pusat Pendidikan dan Latihan Olah raga Pelajar (PPLP)
 - Pembinaan olah raga mahasiswa melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM)

- Kompetisi olah raga pelajar

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut diatas maka ditingkatkan mutu lembaga keolah ragaan, pengadaan sarana/prasarana, pendataan dan pengembangan keolah ragaan yang sangat diperlukan. Juga akan dilaksanakan latihan tenaga olah raga, yang meliputi guru penjaskes/instruktur/olah raga mahasiswa, instruktur/penggerak olah raga jasmani di SKB, pembina/penggerak olah raga masyarakat Departemen dan Non Departemen, instruktur/pelatih olah raga masyarakat. Dan sebagai bahan berupa sarana olah raga diadakan dalam bentuk paket, juga pengadaan prasarana olah raga yang menunjang.

1. Isu Strategis Kebijakan Bidang Olah Raga

Isu kebijakan olah raga berkaitan dengan perubahan dinamik dari lingkungan strategis olah raga dalam lingkup global, terutama yang dipayungi oleh Gerakan Olympiade, dan organisasi profesional pendukungnya, yang berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran akan saling ketergantungan antarbangsa melalui proses difusi kultur olah raga. Permasalahan yang dihadapi oleh sistem keolah ragaan nasional bersumber dari tekanan faktor eksternal, mencakup politik, ekonomi, dan budaya

Perubahan strategi pembangunan nasional dari sentralisasi menjadi desentralisasi dalam pengertian Otonomi Daerah akan lebih banyak menekankan peranan dan partisipasi masyarakat melalui upaya swakelola dan swadana dalam pembinaan olah raga yang searah dengan upaya akselerasi pertumbuhan demokrasi di

segala bidang. Hal ini akan menyebabkan terjadinya pergeseran kebijakan publik di bidang olah raga pada umumnya ke arah pemberdayaan masyarakat di bidang olah raga.

Pergeseran orientasi nilai budaya dari orientasi *asketisme* menjadi *hedonisme*, juga secara nyata telah mempengaruhi perubahan kultur gerak. Pergeseran ini pada gilirannya juga mempengaruhi sikap dan motivasi masyarakat terhadap olah raga, di samping perubahan jenis-jenis kegiatan olah raga atau aktivitas jasmani lainnya. Perubahan orientasi yang amat mendasar ialah bahwa kegiatan berolah raga tidak selalu dalam pengertian olah raga kompetisi dan pencapaian prestasi setinggi-tingginya, tetapi juga tertuju pada tujuan lainnya, seperti untuk kebugaran jasmani, kesehatan, keelokan bentuk tubuh, pengobatan atau pencegahan penyakit berbahaya.

2. Prioritas Pembinaan Olah Raga

- a. Perluasan olah raga masyarakat yang bertumpu pada kemampuan swakelola dan swadana, dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada berbagai tingkat usia dan jenis kelamin, secara nyata, sesuai dengan gerakan "memasyarakatkan olah raga dan mengolah ragakan masyarakat".
- b. Pembinaan olah raga prestasi dengan meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana olah raga serta sumberdaya manusia yang kompeten. Fondasi pembinaan prestasi dibangun melalui pendidikan jasmani, baik melalui pendidikan di sekolah maupun melalui pendidikan masyarakat, yang

didukung oleh aspirasi masyarakat melalui partisipasi dalam olah raga masyarakat. Pembinaan prestasi ini perlu didukung oleh penempatan fasilitas olah raga yang terpadu dengan keseluruhan sistem pembinaan olah raga, termasuk jangkauan lokasi geografis sulit.

- c. Pengembangan pelayanan olah raga untuk untuk kelompok khusus, terutama untuk orang cacat, seperti halnya pendidikan jasmani untuk anak-anak cacat, yang masih membutuhkan peningkatan dalam berbagai aspek, seperti tenaga pembina yang kompeten, termasuk sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaannya.
- d. Pengembangan dan penerapan Iptek olah raga dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam praktek-praktek pembinaan olah raga prestasi. Industri olah raga dalam negeri baru sampai taraf memperoleh hak paten untuk berproduksi terutama untuk perlengkapan, seperti sepatu olah raga dan pakaian olah raga dan alat olah raga.
- e. Peningkatan penelitian dan pengembangan bidang keolah ragaan baik di perguruan tinggi maupun dalam lembaga-lembaga penelitian lainnya untuk dijadikan landasan dalam pembangunan olah raga. Penelitian olah raga dilakukan terhadap berbagai jenis permainan atau olah raga tradisional yang menjadi bagian dari kultur masyarakat yang semakin punah. Penelitian dan pengembangan juga diperlukan dalam aspek peralatan dan perlengkapan olah raga yang hampir seluruhnya bergantung pada produk impor yang mahal.

- f. Penerapan sistem manajemen olah raga yang lebih efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengendalian kegiatan dengan ukuran keberhasilan yang jelas.
- g. Penataan landasan serta pengkajian kelayakan institusional dalam rangka pengembangan industri olah raga.

3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pembinaan Olah raga

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kegiatan Pendidikan Olah raga (1)

Prestasi terdiri atas

- a. 65 persen jumlah siswa yang mengikuti kegiatan cabang olah raga yang beragam diluar mata pelajaran olah raga disekolah.
- b. 100 persen terbukanya kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dan berekreasi dalam pendidikan jasmani yang tertuang dalam kurikulum.
- c. 70 persen siswa yang memiliki tingkat kebugaran yang baik.
- d. 15 klub olah raga pelajar yang dibina di wilayah kabupaten/kota.
- e. 10 siswa percabang olah raga yang terpilih mengikuti POPDA (Pekan Olah raga Pelajar Daerah) tingkat propinsi.
- f. Satu lapangan terbuka seuai cabang olah raga digunakan 5 cabang olah raga.

- g. 1 orang guru pendidikan jasmani mengajar maksimal 7 cabang olah raga di sekolah masing-masing.
- h. 75 persen peralatan olah raga telah sesuai dengan cabang olah raga.
- i. 7 cabang olah raga yang dikompesikan secara teratur minimal setiap dua tahun sekali.
2. Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Statistik dan Pelaporan Pendidikan Olah raga terdiri atas :
- a. 1 (satu) tahun sekali statistik pendidikan olah raga dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah.
- b. 1 (satu) tahun sekali laporan kemajuan pendidikan olah raga disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pembinaan Olah Raga Bagian Olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel 4.4. di bawah ini :

Tabel 4.4. Capaian Indikator SPM Bidang Olah raga Bagian Olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai Standart	Capaian Indikator
1	Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kegiatan Pendidikan Olah raga Prestasi	a. Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan cabang olah raga yang beragam diluar mata pelajaran olah raga disekolah	65 %	50%
		b. Terbukanya kesempatan bagi siswa untuk	100%	85%

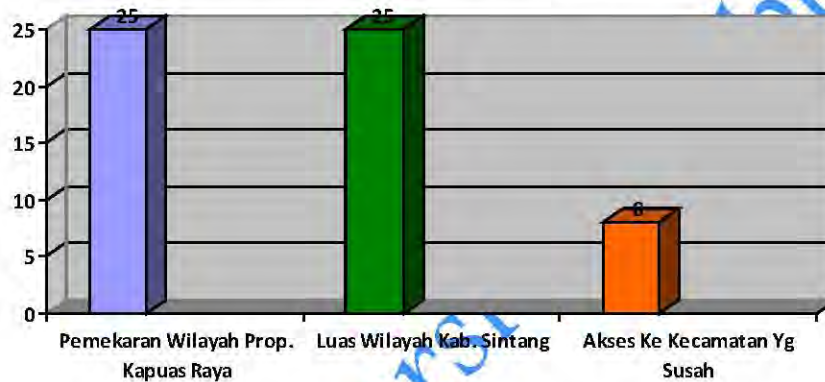
		berpartisipasi dan berekreasi dalam pendidikan jasmani yang tertuang dalam kurikulum		
		c. Siswa yang memiliki tingkat kebugaran yang baik	70%	50%
		d. Klub olah raga pelajar yang dibina di wilayah kabupaten/kota	15 club	12 club
		e. Siswa percabang olah raga yang terpilih mengikuti POPDA (Pekan Olah raga Pelajar Daerah) tingkat propinsi	10 siswa	12 siswa
		f. Satu lapangan terbuka sesuai cabang olah raga digunakan	5 cabor	3 cabor
		g. 1 orang guru pendidikan jasmani mengajar	7 cabor	5 cabor
		h. Peralatan olah raga telah sesuai dengan cabang olah raga	70%	40%
		i. Cabang olah raga yang dikompetisikan secara teratur minimal setiap dua tahun sekali	7 cabor	12 cabor
2	Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Statistik dan Pelaporan Pendidikan Olah raga	a. Statistic pendidikan olah raga dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah	1 kali	1 kali
		b. Laporan kemajuan pendidikan olah raga disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat	1 kali	1 kali

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2008

Dari hasil wawancara terhadap 25 orang responden untuk pertanyaan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, peluang dan kendala/tantangan apa saja yang dapat

dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan/program/kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, hasilnya sebagai berikut.

Gambar 4.6. Hasil wawancara dengan pertanyaan peluang dan kendala/tantangan apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan/program/kebijaksanaan



Dari semua responden 25 orang menjawab pemekaran wilayah Propinsi Kalimantan Barat yang meliputi lima kabupaten yaitu Kabupaten Sintang, Melawai, Sekadau, Sanggau, dan Kapuas Hulu menjadi Propinsi Baru Kapus Raya yang ibu kota propinsi rencananya di Kabupaten Sintang di pilih oleh sebagian besar responden sebagai peluang pengembangan pembinaan olah raga khususnya pelajar. Sedangkan untuk kendala/tantangan yang dihadapi 25 orang yang menjawab luasnya wilayah dan 8 orang menjawab akses ke daerah yang merupakan kendala atau tantangan yang paling berat.

Tabel 4.5. Luas Wilayah Kabupaten Sintang

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (Km ²)	% luas Kab.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Serawai	Nanga Serawai	2.127,50	9,83
2.	Ambalau	Nanga Kemangai	6.386,40	29,52
3.	Kayan Hulu	Nanga Tebidah	937,50	4,33
4.	Sepauk	Nanga Sepauk	1.825,70	8,44
5.	Tempunak	Nanga Tempunak	1.027,00	4,75
6.	Sei Tebelian	Sungai Ukoi	526,50	2,43
7.	Sintang	Sintang	277,05	1,28
8.	Dedai	Nanga Dedai	694,10	3,21
9.	Kayan Hilir	Nanga Mau	1.136,70	5,25
10.	Kelam Permai	Kebong	523,80	2,42
11.	Binjai Hulu	Binjai	307,65	1,42
12.	Ketungau Hilir	Nanga Ketungau	1.544,50	7,14
13.	Ketungau Tengah	Nanga Merakai	2.182,40	10,09
14.	Ketungau Hulu	Senaning	2.138,20	9,88
Kabupaten Sintang			21.635,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang

D. Rencana Strategis

Perencanaan strategik merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi persoalan yang akan dihadapi. Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan puncak untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan

sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan (LAN dan BPKP, 2000:1-3).

Rencana Strategis bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan mungkin timbul. Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Pendidikan saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sintang dan *stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Sintang. Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

1. Pernyataan Visi

Visi adalah Menjadikan masyarakat yang gemar berolah raga dan mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda untuk berprestasi sebagai kader bangsa yang berwawasan masa depan berdasarkan iman dan takwa guna meningkatkan harkat dan martabat bangsa di forum Daerah, Nasional dan internasional.

2. Pernyataan Misi

Misi adalah a). Mewujudkan permasalahan, pembibitan kebugaran olah raga secara optimal melalui prestasi atlet olah raga daerah, Nasional dan internasional, serta menumbuh kembangkan peran serta masyarakat di dalam menangani pembinaan olah raga dan pembangunan sarana/prasarana olah raga untuk memberikan pembinaan dan pelayanan prima. b). Mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat pemuda dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan bertanggung jawab sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

3. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam

memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan strategis tersebut adalah “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Olah raga”

4. Sasaran dan Indikator kinerja sasaran

Sasaran strategis bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijaksanaan, program, dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran.

Sasaran strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai. "Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Olah raga", **dengan sasaran: Meningkatnya**

Pembinaan Olah raga dengan indikator kinerja sasaran diantaranya:

1. Prestasi olah raga tingkat SD/MI
2. Prestasi olah raga tingkat SMP/MTs
3. Prestasi olah raga tingkat SMA/SMK/MA

Dari hasil wawancara dari 25 orang yang kami pakai sebagai responden untuk pertanyaan visi, misi, tujuan dan sasaran bagian olah raga dinas Kabupaten Sintang, semua responden rata-rata memberikan jawaban dengan benar dan dapat menjelaskan secara tepat walaupun secara global, dari hasil wawancara tersebut menandakan dari semua responden yang merupakan orang yang secara langsung melaksanakan pembinaan olah raga dilapangan yaitu pimpinan, staf, penilik bagian olah raga Dinas Pendidikan kabupaten sintang dan guru olah raga mengerti dan memahami visi, misi, tujuan dan sasaran sehingga secara teori dapat menjalankan tugas pokok mereka dengan benar sehingga dalam pembinaan olah raga khususnya olah raga pelajar di Kabupaten Sintang berjalan dengan baik.

5. Kebijakan dan Program

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang beiturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.

Tabel 4.6. Kebijakan dan Program Bagian Olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2008

No.	Kebijakan	No.	Program
1	Pembinaan olah raga diarahkan kepada semangat kebersamaan dan sportifitas tinggi	1	Pembinaan dan pengembangan olah raga

Sumber : Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2008

4. Rencana Kerja Tahun 2008

Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan di depan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja ini menjabarkan rencana program/kegiatan dan targetnya yang dikomitmenkan oleh bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang untuk dapat dicapai pada suatu tahun

anggaran, yaitu tahun 2008. Rencana kinerja tahunan ini akan menjembatani antara Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana kinerja tahunan bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang yang ada didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2008, yang merupakan dokumen yang memberikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tabel 4.7. Program Kerja dan Jenis Kegiatan Bagian Olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2008

Program	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
Pembinaan Olah raga	1. Peringatan HAORNAS	30.043.250,00
	2. Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolah ragaan	61.619.250,00
	3. Pemberian penghargaan bagi insan olah raga yang berdedikasi dan berprestasi	25.221.500,00
	4. Pekan olah raga pelajar antar sekolah	113.680.750,00
	5. POPDA)	234.915.500,00
	6. Pekan olah raga pelajar perbatasan	
	7. Kompetisi antar klub dan KBO	38.568.000,00
	8. Kompetisi olah raga Tradisional	59796.500,00
	9. Honorarium pengurus dan atlet pusat	54.181.500,00
	10. pembinaan latihan olah raga pelajar (PPLOP)	160.310.000,00
	11. Sosialisasi undang-undang olah raga	
	12. Monitoring evaluasi dan pelaporan	25.541.000,00
	13. Pembentukan klub olah raga pelajar	86.400.000,00
	12. Pemeiiharaan rutim/berkala sarana dan prasarana	113.768.500,00
		45.000.000,00
	J U M L A H	1.049.045.750,00

Sumber : Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2008

E. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Pengukuran dan evaluasi kinerja bagian olah raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi bagian olah raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari bagian olah raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang serta memperhatikan program dan kegiatan/proyek bagian olah raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang tahun anggaran 2008.

Dengan adanya tujuan bagian olah raga yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Olah raga, Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan pemuda dan olah raga sehingga memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah yang terpadu untuk memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran tersebut diharapkan dicapai melalui 1 (satu) program, yaitu: Program Pembinaan dan Pengembangan Keolah ragaan. Program tersebut dilaksanakan melalui 1 kegiatan. Koordinator pelaksanaannya adalah bagian Olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang yang didukung oleh bagian-bagian yang lainnya.

Alokasi anggaran dari Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun anggaran 2008, untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah sebesar Rp 1.049.045.750,00 dengan capaian realisasi anggaran pada tabel 4.7. dibawa ini.

Tabel 4.8. Realisasi Anggaran Kegiatan Bagian Olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2008

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realiasi Anggaran (Rp)
1.	Peringatan HAORNAS	30.043.250,00	30.043.250,00
2.	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolah ragaan	61.619.250,00	61.619.250,00
3.	Pemberian penghargaan bagi insan olah raga yang berdedikasi dan berprestasi	25.221.500,00	25.221.500,00
4.	Pekan olah raga pelajar antar sekolah	113.680.750,00	113.680.750,00
5.	Pekan olah raga pelajar antar daerah (POPDA)	234.915.500,00	234.915.500,00
6.	Pekan olah raga pelajar perbatasan	38.568.000,00	38.568.000,00
7.	Kompetisi antar klub dan KBO	59796.500,00	59796.500,00
8.	Kompetisi olah raga Tradisional	54.181.500,00	54.181.500,00
9.	Honorarium pengurus dan atlet pusat pembinaan latihan olah raga pelajar (PPLOP)	160.310.000,00	160.310.000,00
10.	Sosialisasi undang-undang olah raga	25.541.000,00	25.541.000,00
11.	Monitoring evaluasi dan pelaporan	86.400.000,00	86.400.000,00
12.	Pembentukan klub olah raga pelajar	113.768.500,00	113.768.500,00
13.	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana	45.000.000,00	45.000.000,00
J U M L A H		1.049.045.750,00	1.049.045.750,00

Sumber : Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2008

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi anggaran mencapai 100% dari rencana yang dianggarkan hal ini menunjukkan tidak terjadi efisiensi biaya dikarenakan semua anggaran digunakan seluruhnya tidak ada sisa anggaran, dari pertanyaan yang disampaikan kepada respondean apakah dana yang dialokasikan pada masing-masing kegiatan cukup memadai didapat hasil semua responden menjawab memadai guna pelaksanaan masing-masing kegiatan yang telah direncanakan.

Tabel 4.9. Capaian Kinerja Sasaran Bagian Olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2008.

Jenis Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peringatan HAORNAS	OK	1	1	100
2.	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolah ragaan	OK	4	4	100
3.	Pemberian penghargaan bagi insan olah raga yang berdedikasi dan berprestasi	OK	15	15	100
4.	Pekan olah raga pelajar antar sekolah	OH	1	1	100
5.	Pekan olah raga pelajar antar daerah (POPDA)	OH	1	1	100
6.	Pekan olah raga pelajar perbatasan	OH	2	2	100
7.	Kompetisi antar klub dan KBO	OH	1	1	100
8.	Kompetisi olah raga Tradisional	OH	20	20	100
9.	Honorarium pengurus dan atlet pusat pembinaan latihan olah raga pelajar (PPLOP)	OH	2	2	100
10.	Sosialisasi undang-undang olah raga	OK	1	1	100
11.	Monitoring evaluasi dan pelaporan	OK	15	15	100
12.	Pembentukan klub olah raga pelajar	OK	4	4	100
13.	Pemeliharaan rutirn/berkala sarana dan prasarana	OK	4	4	100
Total Capaian (%)					100

Sumber : Laporan Kegiatan Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2008

Dilihat dari tabel di atas capaian indikator sasaran dari 13 kegiatan yang dilaksanakan bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang tahun 2008 mencapai 100% berarti termasuk kategori baik.

Hasil dari kegiatan pembinaan olah raga adalah tercapainya prestasi olah raga tingkat SD/MI, SLTP/SLTSA sebanyak 15 cabang olah raga ditargetkan

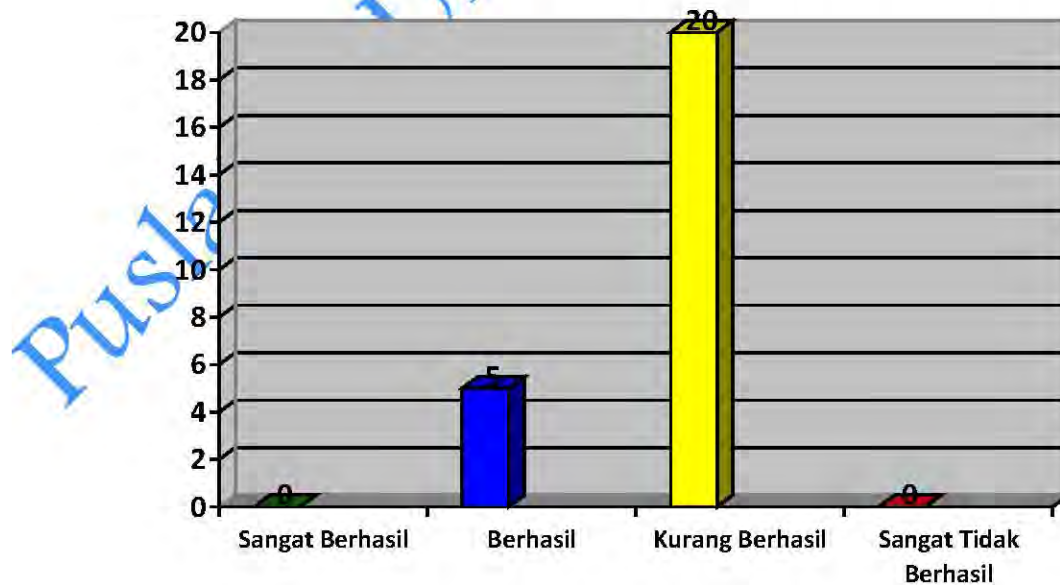
Tabel 4.10. Hasil dari Kegiatan Pembinaan Olah raga Bagian Olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2008 15 Cabang olah raga.

No	Cabang	Tingkat	Kejuaraan	Juara	Tempat
1	L.Jauh	SLTA	POPDA	2	PTK
2	B.Tangkis	SLTP	POPDA	3	
3	T.Lapangan	SD	POR Usia Dini	1	SGU
4	Catur	SD	POR Usia Dini	3	
5	Karate	SD	POR Usia Dini	1	
6	Volly	SD	POR Usia Dini	2	
7	Catur	SMTA	KEJURNAS	2	BATAM
8	Anggar 5 Orang	SMA/SMP	TK Propinsi	-	PTK
9	Takraw	SMP	TK Propinsi	-	PTK
10	P. Silat	SMP	POPDA	3	
11	P. Silat	SMA	POPDA	3	
12	Lari 100M	SMP	POPDA	1	
13	Sepak Bola	SMA	POPDA	-	PTK
14	Bola Voly	SMA	POPDA	-	PTK
15	Basket	SMA	POPDA	1	PTK

Sumber : Laporan Kegiatan Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2008

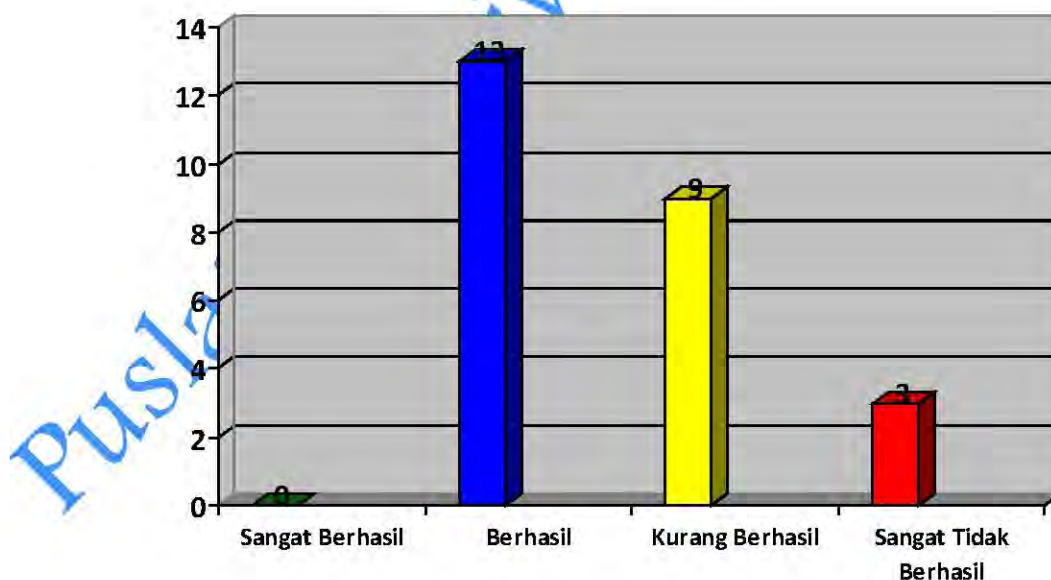
Dari hasil wawancara terhadap 25 orang responden untuk pertanyaan tingkat keberhasilan program Pembinaan dan Pengembangan Keolah ragaan serta apakah telah sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sebagian besar memberikan prosentase yang cukup tinggi rata-rata diatas 70%, hai ini menunjukkan bahwasannya program yang telah dibuat dan dilaksanakan bagian olah raga Dinas Pendidikan telah sesuai dengan visi, misi tujuan dan sasaran yang dicapai berhasil dilaksanakan secara baik oleh bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Untuk pelaksanaan masing-masing kegiatan yang telah dibuat dan dilaksanakan bagian olah raga sebagai penjabaran dari program Pembinaan dan Pengembangan Keolah ragaan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.7. Hasil wawancara dengan pertanyaan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Olah Raga Nasional



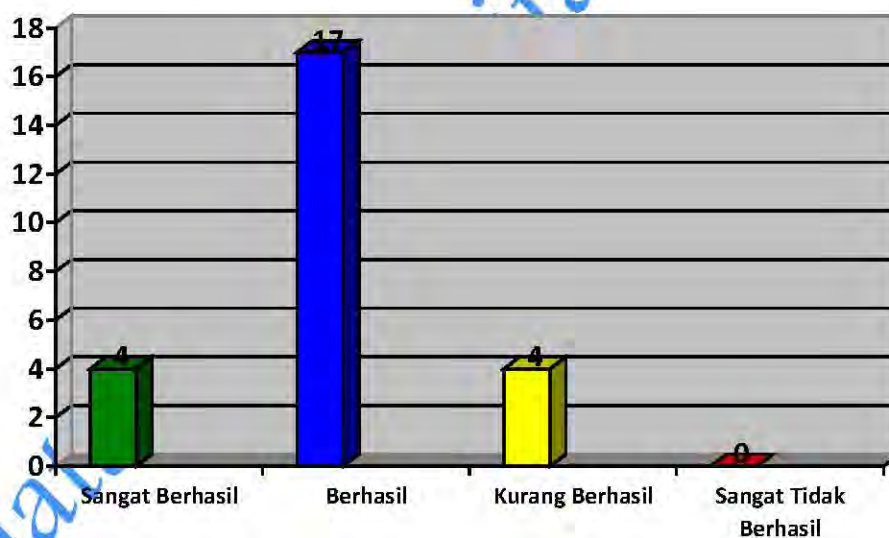
Dari hasil wawancara terhadap responden tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Olah Raga Nasional seperti tergambar pada Gambar 4.5. dari 25 responden yang diberi pertanyaan 5 orang menjawab berhasil, 20 orang menjawab kurang berhasil dengan alasan karena tiap tahunnya hanya diperingati melalui upacara dan senam kesegaran jasmani saja, itu pun biasanya digabungkan dengan peringatan hari besar lainnya oleh pemda Kabupaten Sintang, tanpa dibarengi dengan isu sentral yang sedang berkembang dalam pembinaan olah raga.

Gambar 4.8. Hasil wawancara dengan pertanyaan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosialisasi undang-undang olah raga



Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sosialisasi undang-undang olah raga, seperti tergambar pada Gambar 4.6. dari 25 responden 13 orang menjawab berhasil, 9 orang menjawab kurang berhasil, 3 orang menjawab sangat kurang berhasil dengan alasan dengan adanya tidak seminar dan pelatihan hanya penyebaran perundang-undangan yang baru maupun yang telah berjalan selama ini dirasa kurang efektif.

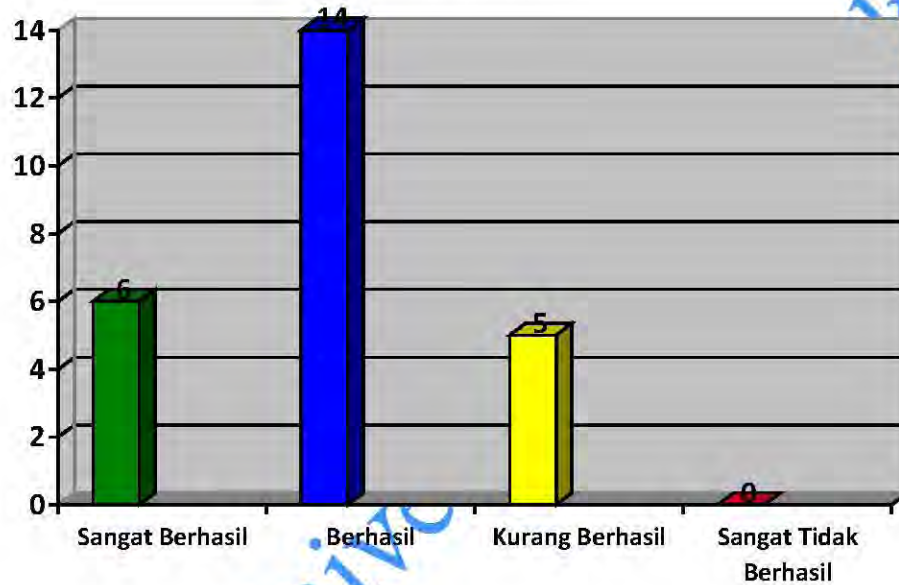
Gambar 4.9. Hasil wawancara dengan pertanyaan tingkat berhasil pelaksanaan kegiatan pembentukan klub olah raga pelajar



Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembentukan klub olah raga pelajar seperti tergambar pada Gambar 4.7. dari 25 responden, 4 orang menjawab sangat berhasil, 17 orang menjawab berhasil, dan 4 orang menjawab kurang berhasil. Minat dari pelajar dalam memilih masing-masing cabang olah raga sangatlah tinggi ditandai dengan banyaknya club-club pelajar yang bermunculan terutama pada cabang-cabang

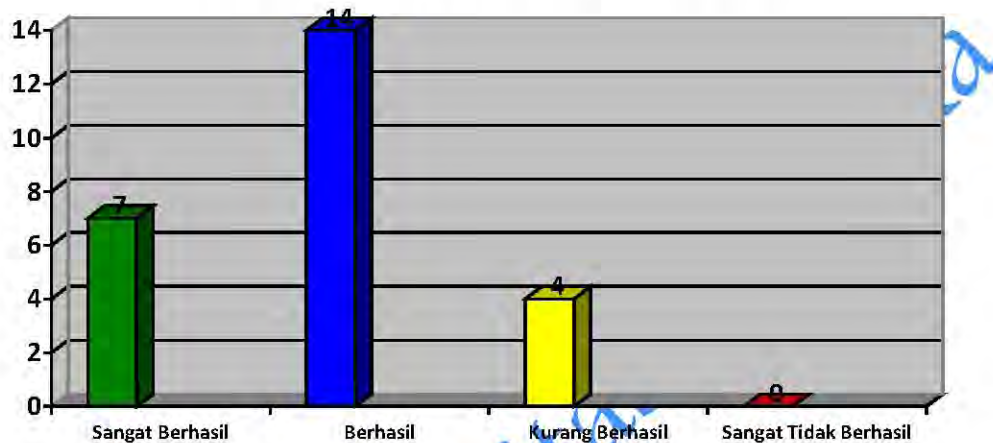
olah raga permainan sepakbola, bola voly, bola basket, sepak takraw, bulutangkis.

Gambar 4.10. Hasil wawancara dengan pertanyaan tingkat berhasil pelaksanaan kegiatan pekan olah raga pelajar antar sekolah.



Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pekan olah raga pelajar antar sekolah seperti tergambar pada Gambar 4.8. dari 25 responden, 6 orang menjawab sangat berhasil, 14 orang menjawab berhasil dan 5 orang menjawab kurang berhasil, banyaknya cabang olah raga yang dipertandingkan dan semuanya diikuti oleh seluruh peserta pekan olah raga pelajar antar sekolah dan diikuti semua sekolah yang ada di sintang serta menyajikan tingkat kompetisi merata disemua cabang olah raga yang dipertandingkan hal ini menunjukkan terjadi pemerataan pembinaan masing-masing cabang olah raga.

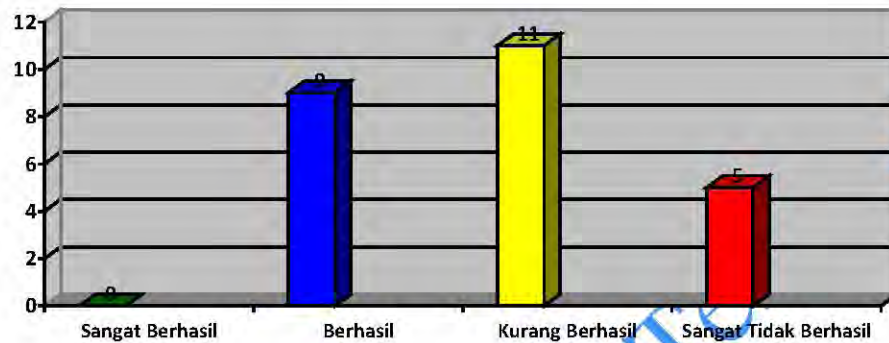
Gambar 4.11. Hasil wawancara dengan pertanyaan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pekan olah raga pelajar antar daerah (POPDA) Kalimantan Barat tahun 2008 yang dilaksanakan di Pontianak.



Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pekan olah raga pelajar antar daerah (POPDA) Kalimantan Barat tahun 2008 yang dilaksanakan di Pontianak, seperti tergambar pada Gambar 4.9. dari 25 responden, 7 orang menjawab sangat berhasil, 14 orang menjawab berhasil dan 4 orang menjawab kurang berhasil.

Banyaknya cabang olah raga yang diikuti dan dari beberapa cabang yang diikuti kontingen sintang mendapat juara antara lain cabang pencak silat 3 medali emas, 2 medali perak, cabang bola basket putra medali perak, putri medali emas cabang sepak takraw mendapatkan 1 medali perunggu, bulutangkis mendapatkan 2 perunggu dan secara keseluruhan peringkat kontingen Kabupaten Sintang di urutan ke 3 dari 14 kabupaten yang mengikuti POPDA Kalimantan Barat tahun 2008 di Pontianak.

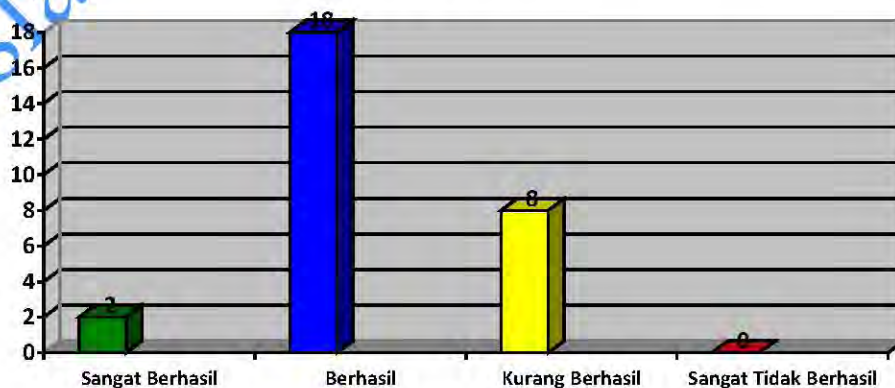
Gambar 4.12. Hasil wawancara dengan pertanyaan tingkat berhasil pelaksanaan kegiatan Kompetisi olah raga Tradisional.



Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan Kompetisi olah raga Tradisional, seperti tergambar pada Gambar 4.10. dari 25 responden, 9 orang menjawab berhasil, 11 orang menjawab kurang berhasil dan 5 orang menjawab sangat tidak berhasil

Kurangnya kompetisi tradisional yang dilakukan dan peserta yang mengikuti kompetisi ini sedikit dibandingkan dengan kompetisi olah raga modern, menjadikan pelaksanaan kegiatan kompetisi olah raga tradisional kurang berhasil.

Gambar 4.13. Hasil wawancara dengan pertanyaan tingkat berhasil pelaksanaan kegiatan kegiatan POR Perbatasan banyak.



Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan POR Perbatasan, seperti tergambar pada Gambar 4.11. dari 25 responden, 2 orang menjawab sangat berhasil, 18 orang menjawab berhasil dan 8 orang menjawab kurang berhasil.

Walaupun dari 3 cabang olah raga yang kontingen Sintang mewakili Indonesia ikuti tidak mendapatkan medali namun secara pembinaan bagi atlet berhasil dengan pengalaman bertanding yang didapat dalam POR Perbatasan di Kucing.

Tabel 4.11. Data Atlet Berprestasi Tahun 2008.

No	Nama	Pada Cabor	Juara	Tingkat	Event	Tempat
1	Esti Dkk (10 Orang)	Bola Basket	I	Propinsi	POPDA	Pontianak
2	Kendy Dkk (10 Orang)	Bola Basket	II	Propinsi	POPDA	Pontianak
3	Wulandari	Tenis Lapangan	III	Propinsi	POPDA	Pontianak
4	Dede + Bayu (Ganda)	Bulu Tangkis	I	Propinsi	POPDA	Pontianak
5	Ediray Dkk (12 Orang)	Sepak Takraw	III	Propinsi	POPDA	Pontianak
6	Dita C	Pencak Silat	II	Propinsi	POPDA	Pontianak
7	Olin	Pencak Silat	II	Propinsi	POPDA	Pontianak
8	Olin	Pencak Silat	II	Nasional	OSSMA	Jakarta
9	Dede + Bayu	Bulu Tangkis	-	Nasional	POPWIL	Bengkulu
10	Fexsi + Mery Andani	Bola Voli	-	Nasional / Internasion al	POPWIL	Bengkulu Sarawak
11	Esti, Suzan, Daniel	Bola Basket	-	Nasional	POPWIL	Bengkulu
12	Raimundus	Sepak Takraw	-	Nasional	POPWIL	Bengkulu

13	Adang. H	Sepak Bola	-	Nasional	POPWIL	Bengkulu
14	Indah w	Tenis Lapangan	-	Nasional	POPWIL	Bengkulu
15	OOS. SMP	-	Umum	Propinsi	OOS SMP	Sintang
16	TIM OOS. SD	Sepak Bola	III II	Propinsi Nasional	OOS SD OOS SD	Pontianak Jakarta
17	Edeng + Fexsi. PA Surti + Mery. PI	Bola Voli Pasir	III	Propinsi	Kompetisi Pelajar	Pontianak
			II	Propinsi	Kompetisi Pelajar	Pontianak
18	Tim Olah raga Tradisional	Engrang/Trampah Panjang	III	Propinsi	Kompetisi	Pontianak

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun 2008

Program Pembinaan dan Pengembangan Keolah ragaan, koordinator pelaksanaannya adalah bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang yang didukung oleh bidang-bidang lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Pencapaian indikator sasaran program Pembinaan dan Pengembangan Keolah ragaan dijelaskan sebagai berikut ini.

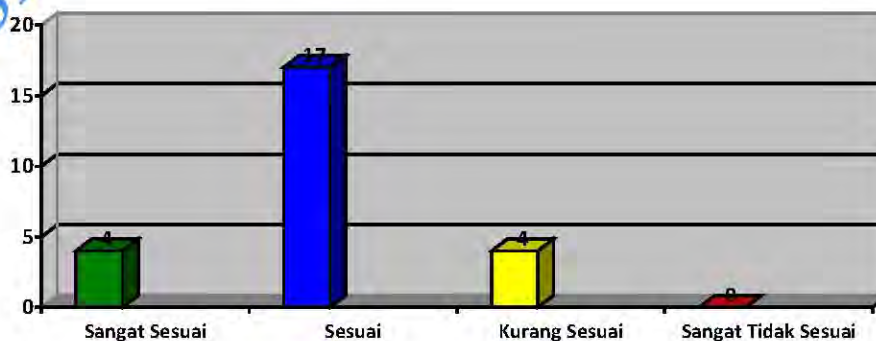
Program Pembinaan dan Pengembangan Keolah ragaan dimaksudkan untuk meningkatkan peranan pemuda dalam pembangunan serta memasyarakatkan olah raga sehingga memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Sintang.

Dalam pelaksanaan program Pembinaan dan Pengembangan Keolah ragaan, bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang telah melaksanakan kegiatan pembinaan keolah ragaan sehingga memberikan kontribusi dalam pencapaian indikator sasaran diatas adalah terlaksananya kegiatan dan tersalurkannya bantuan keuangan dalam kegiatan :

1. Peringatan HAORNAS
2. Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolah ragaan
3. Pemberian penghargaan bagi insan olah raga yang berdedikasi dan berprestasi
4. Pekan olah raga pelajar antar sekolah
5. Pekan olah raga pelajar antar daerah (POPDA)
6. Pekan olah raga pelajar perbatasan
7. Kompetisi antar klub dan KBO
8. Kompetisi olah raga Tradisional
9. Honorarium pengurus dan atlet pusat pembinaan latihan olah raga pelajar (PPLOP)
10. Sosialisasi undang-undang olah raga
11. Monitoring evaluasi dan pelaporan
12. Pembentukan klub olah raga pelajar
13. Pemeiiharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

Dari hasil wawancara dan pertanyaan yang disampaikan apakah pelaksanaan kegiatan pada setiap tahunnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

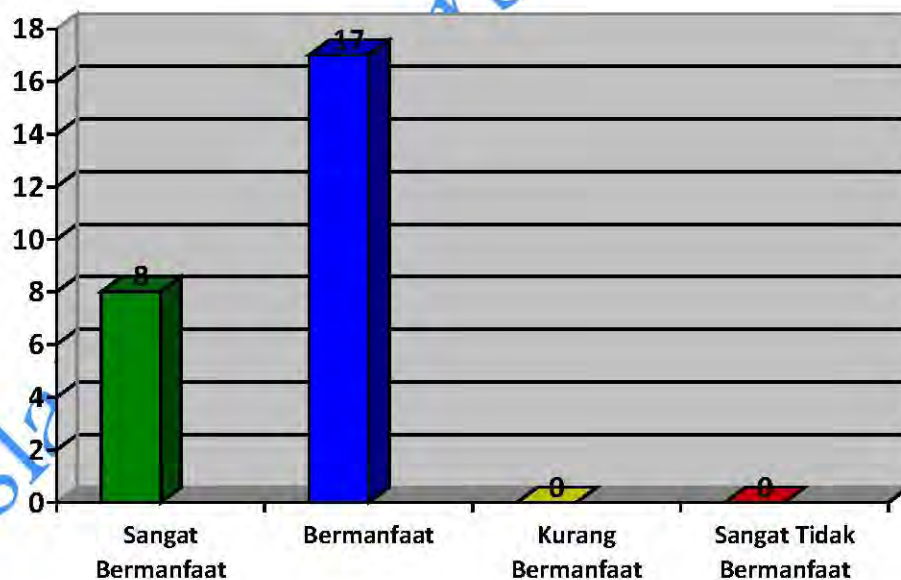
Gambar 4.14. Hasil wawancara dengan pertanyaan apakah pelaksanaan kegiatan pada setiap tahunnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan



Dari 25 responden, 4 orang menjawab sangat sesuai, 17 orang menjawab sesuai, 4 orang menjawab kurang sesuai dalam pelaksanaan kegiatan pada setiap tahunnya dengan rencana yang telah disusun sebelumnya dalam perencanaan masing-masing kegiatan.

Dari hasil wawancara dan pertanyaan yang disampaikan kepada 25 responden apakah pelaksanaan kegiatan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat khususnya pelajar.

Gambar 4.15. Hasil wawancara dengan pertanyaan apakah pelaksanaan kegiatan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat khususnya pelajar



Dari 25 responden, 8 orang menjawab sangat bermanfaat dan 17 orang menjawab bermanfaat, dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang telah disusun bagian olah raga Kabupaten Sintang pada table 4.8 membawa dampak yang bermanfaat dibuktikan

dengan banyaknya kompetisi dan kegiatan olah raga yang ada di Kabupaten Sintang dengan sendirinya membuat kegiatan para pelajar semakin banyak dan itu membawa dampak pada berkurangnya kenakalan yang dilakukan pelajar di Kabupaten Sintang. Dengan banyaknya kompetisi dan pembinaan klub yang dilakukan membawa dampak pada prestasi olah raga pelajar yang semakin baik ditandai dengan kontingen maupun pelajar Kabupaten Sintang yang memenangi kejuaran-kejuaran yang diikuti.

Puslata ~ Universitas Terbuka

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap data penelitian guna mengungkapkan dan menjawab pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan Kinerja Bagian Olah Raga Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang merupakan salah satu bagian yang membatu pelaksanaan program kerja Dinas Pendidikan kususnya olah raga telah meyusun program pembinaan dan kebijakan dalam pembinaan olah raga yang berkelanjutan yang tertuang dalam program kerja bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
2. Dari capaian masing-masing program kegiatan yang telah dilaksanakan bagian olah raga dari efektifitasnya termasuk baik dilihat dari banyaknya atlet pelajar Kabupaten Sintang yang berprestasi dalam kejuaraantingkat Propinsi dan Nasional.
3. Kinerja bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dalam rangka pembinaan olah raga di Kabupaten Sintang dilihat dari efektifitas pelaksanaan program kegiatan antara input dan output secara umum dapat dikatakan baik dan sudah memenuhi standar pelayanan minimal dalam bidang pembinaan olah raga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disampaikan beberapa saran yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh bagian olah raga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sebagai berikut.

1. Memfasilitasi penguatan kelembagaan olah raga masyarakat baik dalam hal dana, advokasi dan konseling sehingga kebijakan ataupun program kerja dapat berjalan secara baik.
2. Perlu adanya penyusunan database sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan program kerja bagian olah raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dalam pembinaan olah raga bagi pelajar yang ada di Kabupaten Sintang.
3. Meningkatkan pemberdayaan instruktur dan pengembangan tenaga relawan yang melaksanakan kegiatan (SDM), penyediaan sarana dan parasarana olah raga serta mendorong masyarakat untuk melaksanakan kegiatan olah raga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.
- Bryson, V. (2002). *Politik - Filsafat, Teori dan Ilmu Politik*. London : Pluto Press.
- Cushway, B (1996). *Human Resource Management*. Dalam Rahadjeng, P.T. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Gramedia.
- Danim, S. (2008). *Kinerja Staf dan Organisasi*. Bandung : Pustaka Setia.
- Departemen Dalam Negeri. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Departemen Dalam Negeri
- Departemen Pendidikan Nasional. (2001). *Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga*, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2000). *Kebijakan Ditjen Dikluspora Dalam Kaitan Otonomi Daerah*” Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.
- Dharma, A (Ed) (1985). *Organisasi Prilaku, Struktur, Proses*, Jakarta : Erlangga.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. (2001). *Program Kerja Bagian Olah Raga Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2008*. Sintang : Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. (2008). *“Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan Proyek-Proyek APBD Bagian Olah Raga Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.*, Sintang : Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.
- Djuharie, O & Suherli, S. (2001). *Panduan Membuat Karya Tulis*. Bandung : Rama Widya.
- Dwiyanto, A.(1995). *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press

- Hariwijaya, T. (2008). *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan skripsi*. Yogyakarta : Tugu Publisher.
- Hasibuan, M. (2001). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia. (1999), *Nomor 7 Tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999, Tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Jakarta
- Irawan, P. (2007). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Keban, Y. (Ed). (1995). *Forecasting Dalam Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Kismartini. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Lenvine, C.(1990). *Public Administration : Challenges, Choice, Consequences*. Glenview Illinois : Scott Foreman/Little Brown Higher Education
- LAN & BPKP (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta : Lembaga Admininstrasi Negara
- Malthist, R.L. & Jackson, J.H. (2002) *Human Resource Management*. Dalam Sadeli, J & Hie, B.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Kesembilan*, Jakarta : Salemba Empat Patria.
- Mangkunegara, A.P. (2000). *Manjemen Sumberdaya Manusia Perusahaan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Margono, K. & Subondo B, (1995). *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press.
- Mink, O.G. & Owen K.Q. & Mink, B. P. (1993). *Developing High-Performance People : The Art of Coaching*. Massachusetts : Addison Wesley.
- Moleong, L.J. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Prasojo, E. (2007). *Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Purwanto, A.J & Kridasakti, S.W & Elu, W.B.(2007). *Teori Organisasi*. Jakarta: Universitas Terbuka

- Qudrat, N.M. (2008). *Manajemen Strategik Organisasi Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Rivai, V. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Sadeli, J. (Ed). (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Soeratno & Arsyad, L. (1999). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : AMP YKPN Yogyakarta.
- Sudjana, N. & Kusumah, A (2000). *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Suharsini, A. (1993). *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sulistiayani, A.T. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia : Konsep, Teori dan Pengembangan dalam konteks organisasi publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Whitmore, J. (1997). *Coaching Performance*. Dalam Purnomo, Y. *Seni Mengarahkan untuk Mendongkrak Kinerja*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja, H.A.W. (2003). *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winardi, J. (2007). *Motivasi dan Pemasukan dalam Manajemen*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

PEDOMAN WAWANCARA

PENGANTAR

Wawancara ini ditujukan sebagai media untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka penulisan **Tesis** (an. Pinarto), yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan Pascasarjana di MAP - UT. Kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini akan menentukan keberhasilan studi saya.

Untuk pertanyaan-pertanyaan berikut, Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi titik-titik pada ruangan yang tersedia. Jika tidak memungkinkan jawaban dapat ditulis pada halaman dibaliknya.

1. Sebutkan **visi** dari Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang ?

.....

.....

.....

.....

.....

2. Sebutkan **misi** dari Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang?

.....

.....

.....

.....

3. Sebutkan apa yang menjadi **tujuan** dari Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang?

.....

.....

.....

.....

4. Sebutkan apa yang menjadi **sasaran** dari Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang ?

.....
.....
.....
.....

5. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sebutkan **kekuatan** apa saja yang dimiliki dalam melaksanakan kegiatan/program/kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada unit kerja Bapak/Ibu.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

6. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, sebutkan **kelemahan** apa saja yang telah dialami dalam melaksanakan kegiatan/program/kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada unit kerja Bapak/Ibu.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

7. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, sebutkan **peluang** apa saja

yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan/program/kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada unit kerja Bapak/Ibu.

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.

8. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, sebutkan **kendala/tantangan** apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada unit kerja Bapak/Ibu.

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.

Puslata ~ Universitas Terbuka

PEDOMAN WAWANCARA

PENGANTAR

Wawancara ini ditujukan sebagai media untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka penulisan **Tesis** (an. Pinarto), yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan Pascasarjana di MAP - UT. Kesiapan Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini akan menentukan keberhasilan studi saya.

Untuk pertanyaan No. 1 s/d 2, pemberian bobot/prosentase program/kegiatan pada masing-masing nomor agar jumlah keseluruhannya tidak melebihi angka 100 (seratus).

1. Untuk pelaksanaan Tupoksi pada Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008, program tersebut adalah :
 - Program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan

Diminta kepada Bapak/Ibu untuk memberikan prosentase tingkat keberhasilan program tersebut apakah telah sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang?

- %

2. Dari program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan, ada 8 (Sembilan) Kegiatan yang akan dilaksanakan seperti tersebut dibawah ini, diminta kepada Bapak/Ibu untuk memberikan prosentase tingkat keberhasilan kepada masing-masing proyek dari program tersebut apakah telah sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang?

Jenis Kegiatan

1. Peringatan HAORNAS	=	%
2. Pekan olahraga pelajar antar sekolah	=	%
3. Pekan olahraga pelajar antar daerah (POPDA)	=	%
4. Pekan olahraga pelajar perbatasan	=	%
5. Kompetisi antar klub dan KBO	=	%
6. Kompetisi olahraga Tradisional	=	%
7. Sosialisasi undang-undang olahraga	=	%
8. Pembentukan klub olahraga pelajar	=	%

3. Menurut Bapak/Ibu, apakah Kegiatan Peringatan Hari Olah Raga Nasional berhasil dalam pelaksanaannya?

- a. Sangat berhasil
 b. Berhasil
 c. Kurang berhasil
 d. Sangat tidak berhasil

Alasan :

.....

.....

4. Menurut Bapak/Ibu, apakah Kegiatan Sosialisasi undang-undang olahraga berhasil dalam pelaksanaannya?

- a. Sangat berhasil
 b. Berhasil
 c. Kurang berhasil
 d. Sangat tidak berhasil

Alasan :

.....

.....

5. Menurut Bapak/Ibu, apakah Kegiatan Pembentukan klub olahraga pelajar sudah memadai bila dilihat jumlah cabang olahraga dan pelajar yang ada ?

- a. Sangat memadai
 b. Memadai
 c. Kurang memadai
 d. Sangat tidak memadai

Alasan :

.....

.....

6. Menurut Bapak/Ibu, apakah Kegiatan Pekan olahraga pelajar antar sekolah sudah memadai bila dilihat tingkat Peminatan dan jumlah Pelajar yang ada ?

- a. Sangat memadai
 c. Kurang memadai

- b. Memadai
d. Sangat tidak memadai

Alasan :

.....

.....

7. Menurut Bapak/Ibu, apakah Kegiatan POPDA di Pontianak sudah berhasil bila dilihat dari hasil yang telah didapat ?

- a. Sangat berhasil
c. Kurang berhasil
b. Berhasil
d. Sangat tidak berhasil

Alasan :

.....

.....

8. Menurut Bapak/Ibu, apakah Kegiatan Kompetisi olahraga Tradisional sudah berhasil bila dilihat dari hasil yang telah didapat ?

- a. Sangat berhasil
c. Kurang berhasil
b. Berhasil
d. Sangat tidak berhasil

Alasan :

.....

.....

9. Menurut Bapak/Ibu, apakah Kegiatan POR Perbatasan sudah berhasil bila dilihat dari hasil yang telah didapat ?

- a. Sangat berhasil
c. Kurang berhasil
b. Berhasil
d. Sangat tidak berhasil

Alasan :

.....

.....

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah dana yang dialokasikan pada masing-masing kegiatan cukup memadai ?

- a. Sangat memadai
c. Kurang memadai
b. Memadai
d. Sangat tidak memadai

Alasan :

.....

.....

11. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan kegiatan pada setiap tahunnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan?

- a. Sangat sesuai
c. Kurang sesuai
b. Sesuai
d. Sangat tidak sesuai

Alasan :

.....

.....

12. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan kegiatan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat khususnya pelajar?

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| a. Sangat bermanfaat | c. Kurang bermanfaat |
| b. Bermanfaat | d. Sangat tidak bermanfaat |

Alasan :

.....

.....

13. Menurut Bapak/Ibu, sejauhmana pengaruh pelaksanaan kegiatan terhadap prestasi pelajar dalam bidang olah raga?

- | | |
|------------------|--------------------------|
| a. Sangat banyak | c. Kurang banyak |
| b. Banyak | d. Tidak ada sama sekali |

Alasan :

.....

.....

14. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana yang ada khususnya yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pada unit kerja Bapak/Ibu ?

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| a. Sangat memadai | c. Kurang memadai |
| b. Memadai | d. Sangat tidak memadai |

Alasan :

.....

.....

15. Berkaitan dengan pertanyaan No. 14, menurut Bapak/Ibu, seberapa besar optimalisasi pemanfaatannya ?

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| a. Sangat besar & optimal | c. Kurang optimal |
| b. Optimal | d. Sangat tidak optimal |

Alasan :

.....

.....

16. Menurut Bapak/Ibu , apakah Sumber Daya Manusia yang tersedia di bagian olah raga sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi?

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| a. Sangat memadai | c. Kurang memadai |
| b. Memadai | d. Sangat tidak memadai |

Alasan :
.....
.....

17. Menurut Bapak/Ibu , bagaimana keberadaan perangkat perundang-undangan yang ada saat ini dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagian saudara ?

- a. Sangat mendukung
- b. Mendukung
- c. Kurang mendukung
- d. Sangat tidak mendukung

Alasan :
.....
.....

18. Menurut Bapak/Ibu , apakah Sumber Daya Manusia yang tersedia di bagian olah raga sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi?

- a. Sangat memadai
- b. Memadai
- c. Kurang memadai
- d. Sangat tidak memadai

Alasan :
.....
.....

Puslata ~ Universitas Terbuka

REKAPITULASI HASIL WAWANCARA

(dari jawaban responden)

NO.	NAMA	Pertanyaan																			
		3				4				5				6				7			
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	Responden 1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
2	Responden 2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
3	Responden 3	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
4	Responden 4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
5	Responden 5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
6	Responden 6	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
7	Responden 7	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
8	Responden 8	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
9	Responden 9	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
10	Responden 10	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
11	Responden 11	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
12	Responden 12	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
13	Responden 13	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
14	Responden 14	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
15	Responden 15	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
16	Responden 16	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
17	Responden 17	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	
18	Responden 18	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
19	Responden 19	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
20	Responden 20	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
21	Responden 21	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
22	Responden 22	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
23	Responden 23	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
24	Responden 24	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
25	Responden 25	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
	Jumlah	-	5	20	-	-	13	9	3	4	17	4	-	6	14	5	-	7	14	4	-

REKAPITULASI HASIL WAWANCARA

(dari jawaban responden)

NO.	NAMA	Pertanyaan																			
		8				9				10				11				12			
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	Responden 1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
2	Responden 2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
3	Responden 3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
4	Responden 4	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
5	Responden 5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
6	Responden 6	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
7	Responden 7	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
8	Responden 8	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
9	Responden 9	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
10	Responden 10	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
11	Responden 11	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
12	Responden 12	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
13	Responden 13	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
14	Responden 14	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
15	Responden 15	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
16	Responden 16	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
17	Responden 17	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
18	Responden 18	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
19	Responden 19	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
20	Responden 20	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
21	Responden 21	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
22	Responden 22	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
23	Responden 23	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
24	Responden 24	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
25	Responden 25	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	Jumlah	-	9	11	5	2	18	5	-	2	19	4	-	4	17	4	-	8	17	-	-

REKAPITULASI HASIL WAWANCARA

(dari jawaban responden)

NO.	NAMA	Pertanyaan																			
		13				14				15				16				17			
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1	Responden 1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
2	Responden 2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
3	Responden 3	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
4	Responden 4	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
5	Responden 5	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
6	Responden 6	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
7	Responden 7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
8	Responden 8	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
9	Responden 9	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
10	Responden 10	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	
11	Responden 11	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
12	Responden 12	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
13	Responden 13	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	
14	Responden 14	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	
15	Responden 15	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
16	Responden 16	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
17	Responden 17	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	
18	Responden 18	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
19	Responden 19	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
20	Responden 20	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
21	Responden 21	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
22	Responden 22	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
23	Responden 23	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
24	Responden 24	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
25	Responden 25	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
	Jumlah	8	13	4	-	-	10	15	-	5	15	5	-	3	17	5	-	2	18	5	

REKAPITULASI HASIL WAWANCARA

(dari pertanyaan yang di ajukan)

No.	Pertanyaan	Jawaban Responden (org)					Prosentase Hasil Pertanyaan (%)				
		a	b	c	d	Jumlah	a	b	c	d	Jumlah
3	Menurut Bapak/Ibu, apakah Kegiatan Peringatan Hari Olah Raga Nasional berhasil dalam pelaksanaannya?	-	5	20	-	25	0	20	80	0	100
4	Menurut Bapak/Ibu, apakah Kegiatan Sosialisasi undang-undang olahraga berhasil dalam pelaksanaannya?	-	13	9	3	25	0	52	36	12	100
5	Menurut Bapak/Ibu, apakah Kegiatan Pembentukan klub olahraga pelajar sudah memadai bila dilihat jumlah cabang olahraga dan pelajar yang ada ?	4	17	4	-	25	16	68	16	0	100
6	Menurut Bapak/Ibu, apakah Kegiatan Pekan olahraga pelajar antar sekolah sudah memadai bila dilihat tingkat Peminatan dan jumlah Pelajar yang ada ?	6	14	5	-	25	24	56	20	0	100
7	Menurut Bapak/Ibu, apakah Kegiatan POPDA di Pontianak sudah berhasil bila dilihat dari hasil yang telah didapat ?	7	14	4	-	25	28	56	16	0	100
8	Menurut Bapak/Ibu, apakah Kegiatan Kompetisi olahraga Tradisional sudah berhasil bila dilihat dari hasil yang telah didapat ?	-	9	11	5	25	0	36	44	20	100
9	Menurut Bapak/Ibu, apakah Kegiatan POR Perbatasan sudah berhasil bila dilihat dari hasil yang telah didapat ?	2	18	5	-	25	8	72	20	0	100
10	Menurut Bapak/Ibu, apakah dana yang dialokasikan pada masing-masing kegiatan cukup memadai ?	2	19	4	-	25	8	76	16	0	100
11	Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan kegiatan pada setiap tahunnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan?	4	17	4	-	25	16	68	16	0	100
12	Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan kegiatan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat khususnya pelajar?	8	17	-	-	25	32	68	0	0	100
13	Menurut Bapak/Ibu, sejauhmana pengaruh pelaksanaan kegiatan terhadap prestasi pelajar dalam bidang olah raga?	8	13	4	-	25	32	52	16	0	100
14	Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana yang ada khususnya yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pada unit kerja Bapak/Ibu ?	-	10	15	-	25	0	40	60	0	100
15	Berkaitan dengan pertanyaan No. 14, menurut Bapak/Ibu, seberapa besar optimalisasi pemanfaatannya ?	5	15	5	-	25	20	60	20	0	100
16	Menurut Bapak/Ibu , apakah Sumber Daya Manusia yang tersedia di bagian olah raga sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi?	3	17	5	-	25	12	68	20	0	100
17	Menurut Bapak/Ibu , bagaimana keberadaan perangkat perundang-undangan yang ada saat ini dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagian saudara ?	2	18	5	-	25	8	72	20	0	100

HASIL WAWANCARA
KINERJA BAGIAN OLAH RAGA PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG

PENGANTAR

Wawancara ini ditujukan sebagai media untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka penulisan Tesis (an. Pinarto), yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan Pascasarjana di MAP - UT. Kesediaan Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini akan menentukan keberhasilan studi saya.

Untuk pertanyaan-pertanyaan berikut, Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi titik-titik pada ruangan yang tersedia. Jika tidak memungkinkan jawaban dapat ditulis pada halaman dibaliknya.

1. Sebutkan visi dari Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang ?

Menjadikan masyarakat gemar berolahraga, mengembangkan iklim kondusif bagi generasi muda untuk berprestasi sebagai kader bangsa yang berwawasan masa depan berdasarkan iman dan takwa guna meningkatkan harkat dan martabat bangsa di forum Daerah, Nasional dan internasional.

2. Sebutkan misi dari Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang?

- Mewujudkan pemarkahatan, pembibitan kebugaran olahraga secara optimal melalui prestasi atlit olahragawan daerah. Nasional dan internasional, serta menumbuh kembangkan peran serta rnasyarakat di dalam menangani pembinaan olahraga dan pembangunan sarana/prasarana olahraga untuk memberikan pembinaan den pelayanan prima.

- Mengaktulisasikan segenap potensi, bakat dan minat pemuda dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas den bertanggung jawab sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlaq mulia, patriotis, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat

3. Sebutkan apa yang menjadi tujuan dari Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang?

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan Olahraga

4. Sebutkan apa yang menjadi sasaran dari Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang ?

Meningkatnya Pembinaan Olahraga

5. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sebutkan kekuatan apa saja yang dimiliki dalam melaksanakan kegiatan/program/kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada unit kerja Bapak/Ibu.

- Sarana dan prasarana dan Sumber daya manusia

6. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, sebutkan peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan/program/kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada unit kerja Bapak/Ibu.

- Propinsi Kapuas Raya Sebagai pemekaran wilayah baru

7. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, sebutkan kendala/tantangan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada unit kerja Bapak/Ibu.

- Luas wilayah Kabupaten sintang yang luas dan akses ke daerah yang masih sulit di tempuh.

8. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, sebutkan kendala/tantangan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada unit kerja Bapak/Ibu.

Luas wilayah Kabupaten sintang yang luas dan akses ke daerah yang masih sulit di tempuh.

9. Untuk pelaksanaan Tupoksi pada Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2008, program tersebut adalah *Program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan*

Diminta kepada Bapak/Ibu untuk memberikan prosentase tingkat keberhasilan program tersebut apakah telah sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang? - 90 %

10. Dari program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan, ada 8 (Sembilan) Kegiatan yang akan dilaksanakan seperti tersebut dibawah ini, diminta kepada Bapak/Ibu untuk memberikan prosentase tingkat keberhasilan kepada masing-masing proyek dari program tersebut apakah telah sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Bagian Olah Raga Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang?

Jenis Kegiatan

1. Peringatan HAORNAS	=	85	%
2. Pekan olahraga pelajar antar sekolah	=	90	%
3. Pekan olahraga pelajar antar daerah (POPDA)	=	90	%
4. Pekan olahraga pelajar perbatasan	=	80	%
5. Kompetisi antar klub dan KBO	=	90	%
6. Kompetisi olahraga Tradisional	=	45	%
7. Sosialisasi undang-undang olahraga	=	80	%
8. Pembentukan klub olahraga pelajar	=	90	%

11. Apakah Kegiatan Peringatan Hari Olah Raga Nasional berhasil dalam pelaksanaannya?*b.Berhasil*

Alasan : karena telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dituangkan di dalam program kerja

12. Apakah Kegiatan Sosialisasi undang-undang olahraga berhasil dalam pelaksanaannya?*b.Berhasil*

Alasan : kerana telah dilaksanakan seminar dan sosialisasi perundang-undangan olahraga yang baru dan lama serta penyebaran undang-undang baru kepada para pebina olah raga di kabupaten sintang.

13. Apakah Kegiatan Pembentukan klub olahraga pelajar sudah memadai bila dilihat jumlah cabang olahraga dan pelajar yang ada ?*b.Memadai*

Alasan : telah banyak klub-klub olahraga pelajar yang mengikuti pertandingan dimasing-masing cabangnya.

14. Apakah Kegiatan Pekan olahraga pelajar antar sekolah sudah memadai bila dilihat tingkat Peminatan dan jumlah Pelajar yang ada ?*b. Memadai*
Alasan : karena banyaknya sekolah yang telah mengikuti pekan olahraga pelajar.
15. Apakah Kegiatan POPDA di Pontianak sudah berhasil bila dilihat dari hasil yang telah didapat ?*b.Berhasil*
Alasan : kegiatan telah diikuti secara baik dan tanpa ada pemsarakatan yang berarti dan dari beberapa cabang juara satu atau mendapatkan mendali emas.
16. Apakah Kegiatan Kompetisi olahraga Tradisional sudah berhasil bila dilihat dari hasil yang telah didapat ?*b.Kurang Berhasil*
Alasan : sedikitnya kompetisi yang ada
17. Apakah Kegiatan POR Perbatasan sudah berhasil bila dilihat dari hasil yang telah didapat ? *b.Berhasil*
Alasan : diikuti dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti walau tidak ada yang cabang yang menang dikarenakan atlet kucing atlit nasional sedangkan kita atlit propinsi
18. Apakah dana yang dialokasikan pada masing-masing kegiatan cukup memadai ?*b.Memadai*
19. Apakah pelaksanaan kegiatan pada setiap tahunnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan?*b.Sesuai*
20. Apakah pelaksanaan kegiatan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat khususnya pelajar?*b.Bermanfaat*
Alasan : pelajar semakin banyak kegiatan sehingga terhidar dari kenakalan pelajar
21. Sejauhmana pengaruh pelaksanaan kegiatan terhadap prestasi pelajar dalam bidang olah raga?*b.Banyak*
Alasan : banyaknya atlit-atlit yang berbakat bermunculan
22. Bagaimanakah ketersediaan sarana dan prasarana yang ada khususnya yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pada unit kerja Bapak/Ibu ? *b.Memadai*
23. Berkaitan dengan pertanyaan No. 14, menurut Bapak/Ibu, seberapa besar optimalisasi pemanfaatannya ?*b.Optimal*

24. Apakah Sumber Daya Manusia yang tersedia di bagian olah raga sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi?*b.Memadai*
25. Bagaimana keberadaan perangkat perundang-undangan yang ada saat ini dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagian saudara?*b. Mendukung*
Alasan : dengan adanya undang-undang otonomi daerah

Puslata ~ Universitas Terbuka

BIODATA PENULIS

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : PINARTO, S.IP
2. NIM : 014945333
3. Tempat / tanggal lahir : Seranggas, 21 Agustus 1964
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Agama : Islam
6. Status : Kawin
7. Pekerjaan : PNS
8. Alamat :

Rumah	:	Jl. P. Antasari RT. 1 /RW. 7 Sintang
No. HP	:	08125717959
Kantor	:	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang
Telp.	:	(0565) 21605 – 21606
Fax	:	(0565) 21605
9. Nama Ayah : DAKA
10. Nama Ibu : GADI

B. PENDIDIKAN

1. SD : SD.S Lanjang Kecamatan Kelam Permai Sintang
2. SMP : SMP.S 17 Agustus Sintang
3. SMA : SMA.N 1 Sintang
4. Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka

C. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Staf bagian Pemuda & Olahraga Diknas Kab. Sintang
2. Pengawas Olahraga Diknas Kec. Sintang
3. Kasi Pemuda & Olahraga Diknas Kab. Sintang
4. Kasi Seni Budaya & Olahraga SMP / SMA & Perguruan Tinggi Diknas Kab. Sintang (DIKMENTI)

D. STATUS PERKAWINAN (KELUARGA)

1. Nama Istri : SRI HARTATI
2. Tempat / tanggal lahir : Sintang, 12 Desember 1968
3. Pendidikan : Tamatan SMA
4. Pekerjaan : Rumah Tangga
5. Anak : 5 (lima) orang



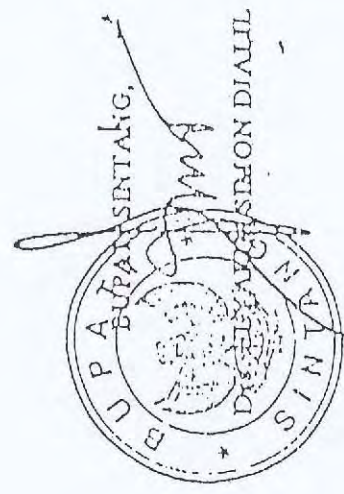
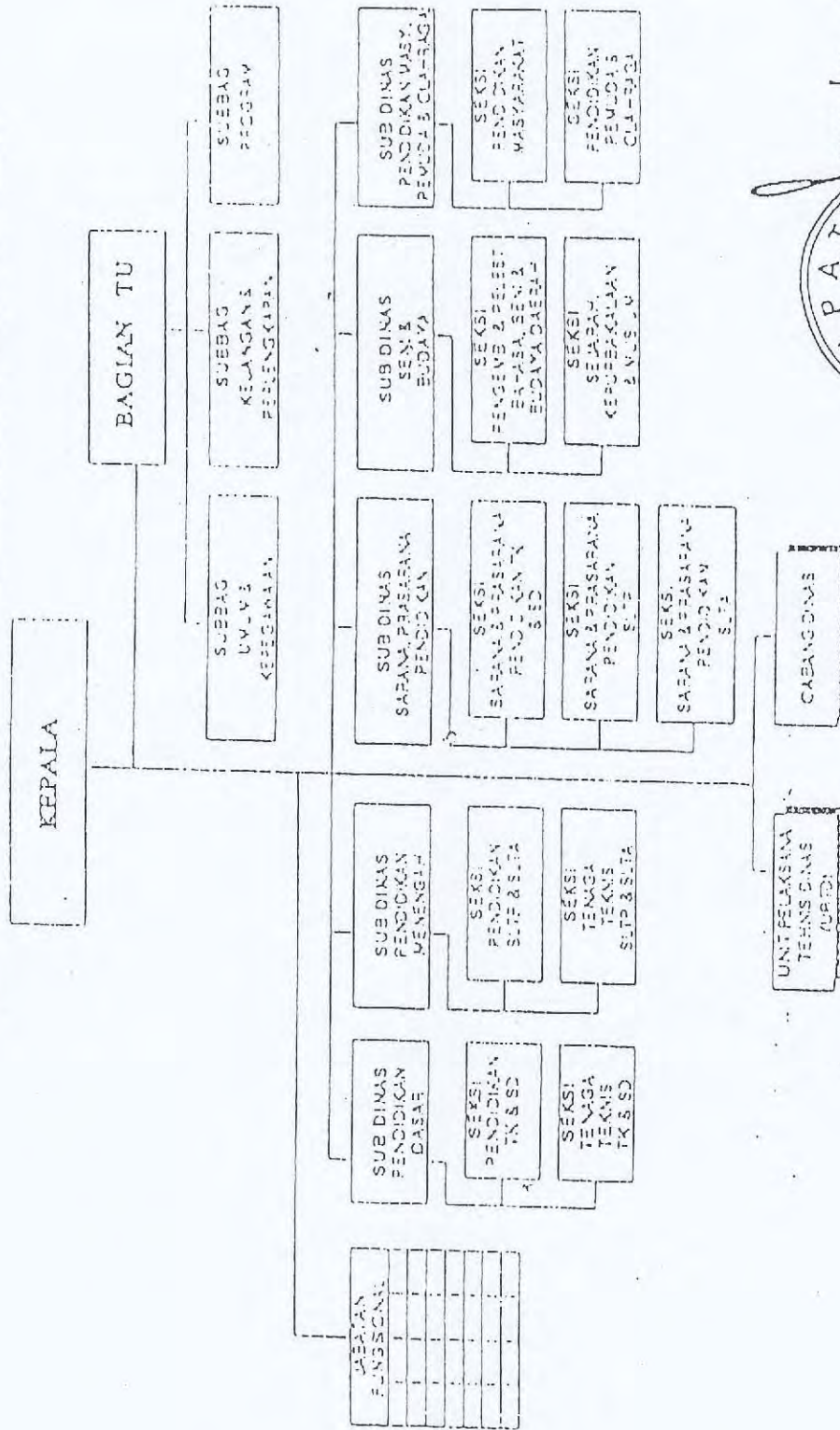
Pontianak, Agustus 2009

Penulis

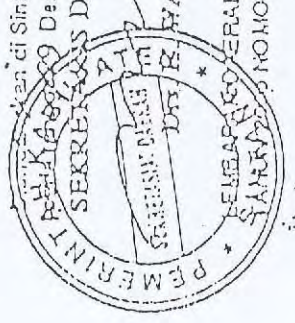
PINARTO, S.IP

TANGGAL 29 DESEMBER 2000

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG



Kepala Kantor di Sintang
 29 Desember 2000
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
 DR. H. HASBIR MARTHA



40311.pdf

MALAYSIA SELATAN

KABUPATEN SANGGAU

KABUPATEN BERKAU

KABUPATEN KETAPANG

KABUPATEN MELANG

KABUPATEN KAPUAS MUDA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Scale 1 : 500.000



KETERANGAN

Administrasi	KETERANGAN
1. Batas Kabupaten	MERAH
2. Batas Kecamatan	ORANG KEMUDI
3. Batas Desa	ORANG KEMUDI
4. Desa	ORANG KEMUDI
5. Desa	ORANG KEMUDI
6. Desa	ORANG KEMUDI
7. Desa	ORANG KEMUDI
8. Desa	ORANG KEMUDI
9. Desa	ORANG KEMUDI
10. Desa	ORANG KEMUDI
11. Desa	ORANG KEMUDI
12. Desa	ORANG KEMUDI
13. Desa	ORANG KEMUDI
14. Desa	ORANG KEMUDI
15. Desa	ORANG KEMUDI
16. Desa	ORANG KEMUDI
17. Desa	ORANG KEMUDI
18. Desa	ORANG KEMUDI
19. Desa	ORANG KEMUDI
20. Desa	ORANG KEMUDI
21. Desa	ORANG KEMUDI
22. Desa	ORANG KEMUDI
23. Desa	ORANG KEMUDI
24. Desa	ORANG KEMUDI
25. Desa	ORANG KEMUDI
26. Desa	ORANG KEMUDI
27. Desa	ORANG KEMUDI
28. Desa	ORANG KEMUDI
29. Desa	ORANG KEMUDI
30. Desa	ORANG KEMUDI
31. Desa	ORANG KEMUDI
32. Desa	ORANG KEMUDI
33. Desa	ORANG KEMUDI
34. Desa	ORANG KEMUDI
35. Desa	ORANG KEMUDI
36. Desa	ORANG KEMUDI
37. Desa	ORANG KEMUDI
38. Desa	ORANG KEMUDI
39. Desa	ORANG KEMUDI
40. Desa	ORANG KEMUDI
41. Desa	ORANG KEMUDI
42. Desa	ORANG KEMUDI
43. Desa	ORANG KEMUDI
44. Desa	ORANG KEMUDI
45. Desa	ORANG KEMUDI
46. Desa	ORANG KEMUDI
47. Desa	ORANG KEMUDI
48. Desa	ORANG KEMUDI
49. Desa	ORANG KEMUDI
50. Desa	ORANG KEMUDI

